



LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN



JANUARI 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dapat melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh sekretariat, bagian, bidang kerja dan UPT Dinas Pendidikan yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian laporan kinerja Dinas Pendidikan merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja sekretariat, bagian, bidang maupun UPT secara keseluruhan.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023. Pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023 ditetapkan 7 sasaran dan 18 indikator kinerja, strategis yang dijabarkan dalam 4 program pembangunan Pendidikan. Secara umum Dinas Pendidikan berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang.

Padang, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. Barlius, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660630 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	1
B. Aspek Strategis Organisasi	7
C. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>)	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	21
B. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	23
C. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	25
D. Realisasi Anggaran Tahun 2023	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan sejak tanggal 18 Maret 2022 dijabat Bapak Drs. Barlius, MM menggantikan Adib Alfikri, SE, M.Si

1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan (SK Gubernur No:46 Tahun 2017)

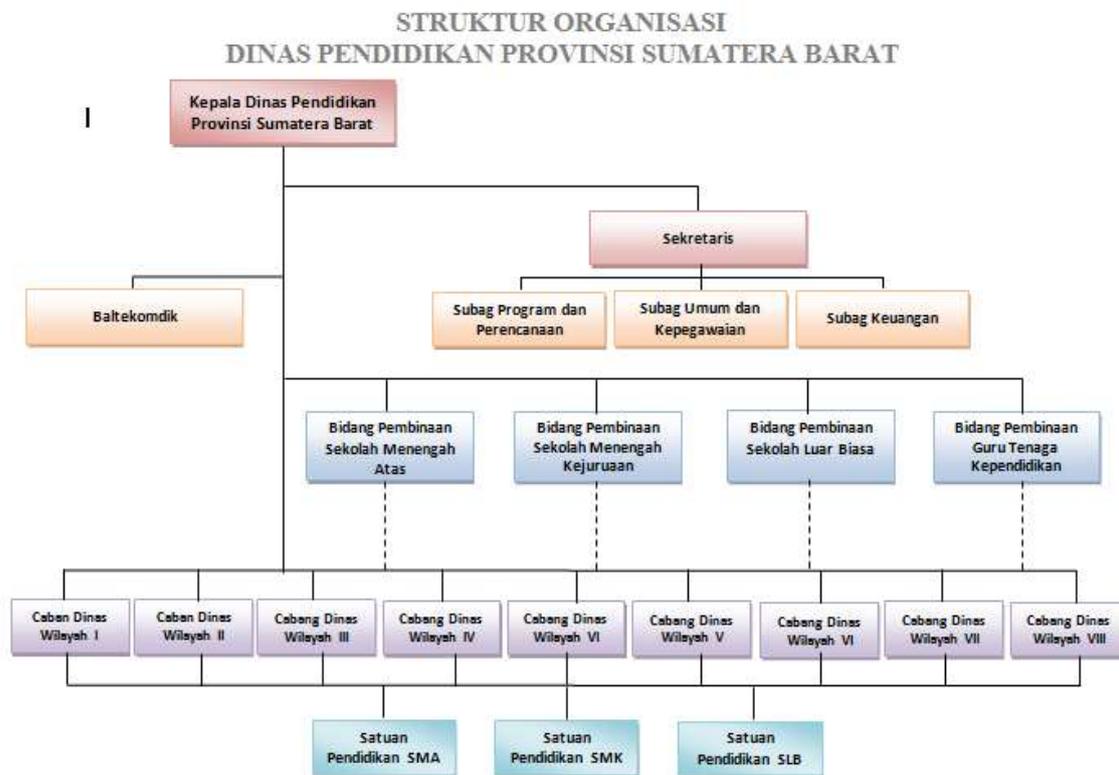
2. Fungsi

- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c) Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, lingkup provinsi dan kabupaten/Kota
- d) Melaksanakan kesekretariatan dan perencanaan Dinas
- e) Melakukan pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB)
- f) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan
- g) Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan dengan Cabang Dinas Pendidikan
- h) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pergub No. 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan diberlakukannya Pergub tersebut dan dilantiknya pejabat struktural eselon IV a dan IV b pada Cabang Dinas dan hilangnya pejabat eselon IV a dibawah Bidang SMA/K dan SLB Bagan Struktur Organisasi SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan telah ditetapkannya Pergub No. 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Daerah sehingga terjadi perubahan bagan struktur organisasi dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :



Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di atas, terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Pembinaan SMA;
3. Pembinaan SMK;
4. Pembinaan SLB;
5. Pembinaan GTK;
6. Cabang Dinas;
7. UPTD Baltekkomdik;
8. Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat,

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Program dan Perencanaan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu :

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan program, anggaran, laporan, keuangan, kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan laporan;
- b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- c) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan perencanaan;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- e) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- f) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.

b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Menengah Atas; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Menengah Atas.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Luar Biasa;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Luar Biasa; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Luar Biasa.

e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang meliputi pendataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan.
- b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja tentang pembinaan calon kepala sekolah, pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan
- c. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja penyediaan wadah bagi guru untuk mempublikasikan penulisan karya ilmiah baik cetak maupun elektronik.

f. Cabang Dinas

Dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang urusan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maka dibentuk Cabang Dinas dengan pergub No. 42 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Bukittinggi, Kelas A(Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Agam)
- b) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman, Kelas A(Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)
- c) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Aro Suka, Kelas A(Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan)
- d) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Payakumbuh, Kelas A(Kota Payakumbuh, Kab. Tanah datar, Kab. Lima Puluh Kota)
- e) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Muaro Sijunjung, Kelas A(Kab. Sijunjung, Kab. Sawahlunto, Kab. Dharmasraya)
- f) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kinali, Kelas A(Kab. Pasaman, dan kab. Pasaman Barat)
- g) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Painan, Kelas A(Kab. Pesisir Selatan)
- h) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A (Kab. Kep. Mentawai)

Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A terdiri dari :

- a. Kepala Cabang
- b. Subag tata usaha
- c. Seksi sekolah menengah Atas
- d. Seksi Sekolah menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
- e. Kelompok jabatan Fungsional

Tugas Pokok :

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa diwilayah kerjanya.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, teknis operasional, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan; dan
- c. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Baltekkomdik membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Subag Pengembangan Program dan evaluasi;
3. Subag Pemanfaatan Media, TIK Pendidikan.

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (UPTD) Baltekkomdik memiliki

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas yaitu teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan.

Fungsi :

- a. Memfasilitasi Penyusunan rencana dan program kerja seksi-seksi di lingkungan UPTD Baltekkomdik
- b. Memfasilitasi penyusunan, perumusan dan komunikasi pendidikan
- c. Memfasilitasi pelayanan pengembangan teknologi dan komunikasi pendidikan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

Pengawas Sekolah, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2023 tercatat sebanyak 13.102 orang yang terdiri dari 10.377 orang PNS dan 2.725 orang PPPK, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan Golongan dan Esselon
Tahun 2023

NO	Gol/ Ruang	Eselon						Non Eselon				Jumlah
		I	II	III A	III B	IV A	IV B	Guru	Pengawas	Staf	PPP K	
	<u>GOLONGAN. IV</u>											
1	Golongan. IV/e											
2	Golongan. IV/d							3	1			4
3	Golongan. IV/c		1		1			78	6			86
4	Golongan. IV/b			5	5		1	1.747	79		2	1.839
5	Golongan. IV/a				1	12	3	2.363	17	29		2.425
	Jumlah Gol. IV	-	1	5	7	13	3	4.191	103	31	-	4.354
	<u>Golongan. III</u>											
1	Golongan III/d				2	13	13	2.262	5	97		2.392
2	Golongan III/c					3	21	1.458	1	71		1.554
3	Golongan III/b						7	530		154	3	694
4	Golongan III/a							233		756	2.722	3.711
	Jumlah Gol. III	-	-	-	2	16	41	4.483	6	1.078	2.725	8.351
	<u>Golongan. II</u>											
1	Golongan II/d							4		52		56
2	Golongan II/c							2		279		281
3	Golongan II/b							2		21		23
4	Golongan II/a									15		15
	Jumlah Gol. II	-	-	-	-	-	-	8	-	367	-	375
	<u>Golongan. I</u>											
1	Golongan I/d									11		11
2	Golongan I/c									10		10
3	Golongan I/b									1		1
4	Golongan I/a											-
	Jumlah Gol. I									22		22
	JML TOTAL	-	1	5	9	29	44	8682	109	1.489	2.725	13.102

B. Aspek Strategis Organisasi

Pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

- b. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan;
- c. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal;
- d. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Pelaksanaan pengendalian perizinan pendidikan
- f. Penguatan pengembangan bahasa dan sastra.

Ketercapaian Aspek Strategis Organisasi dari sisi kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari **RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022–2026** dan sesuai visi pembangunan Sumatera Barat 2022 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada **Misi Pertama** yaitu *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing”*. Sedangkan Tujuan sesuai dengan Misi ke 1 yang terkait dengan Pendidikan tersebut adalah:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia sehat, unggul, dan berdaya saing.
- b. Terwujudnya kualitas perencanaan pendidikan berbasis data valid dan terintegrasi.
- c. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah, kejuruan dan pendidikan khusus.
- d. Meningkatnya akses layanan pendidikan menengah, khusus dan inklusif untuk seluruh penduduk usia sekolah.
- e. Terwujudnya satuan pendidikan yang memenuhi standar sekolah sehat.
- f. Meningkatnya kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi dan karakter siswa.
- g. Meningkatnya daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- h. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 2. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- 3. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 4. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 5. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama penentuan isu strategis di bidang pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
2. Kebutuhan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal belum bersinergi antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Masih belum meratanya kesejahteraan guru terutama yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
4. Belum terpenuhinya kualitas, kuantitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
5. Masih kurangnya SMK yang unggul berbasis potensi daerah maupun jurusan pendidikan yang ramah dunia kerja.
6. Belum optimalnya pengembangan karakter berdasarkan minat, bakat dan kreativitas siswa.
7. Masih kurangnya pendidikan kewirausahaan pada pendidikan vokasi secara berkelanjutan.
8. Belum meratanya akses dan mutu sekolah luar biasa dan sekolah inklusi sehingga lulusan SLB belum terserap secara maksimal di dunia kerja.
9. Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

Disamping itu adanya beberapa tantangan atau ancaman dari luar, yakni:

1. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
2. Pesatnya Peningkatan Kualitas Pendidikan Provinsi tetangga;
3. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan
4. Disorientasi penggunaan teknologi informasi.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi
Gambaran Organisasi memuat dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia
- b. Aspek Strategis Organisasi
- c. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel)
- c. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing- masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- d. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Eselon II
2. Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah tahun 2023
3. Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN

Visi dan Misi Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mempedomani Tujuan dan Sasaran RPJMD maka Tujuan yang Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah *“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”* Sedangkan Indikator dan Target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Target Tahunan Capaian Tujuan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10
			Rata-rata Lama Sekolah	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A	A	A	A	A
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Selanjutnya untuk mencapai Tujuan Jangka Menengah tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya kualitas perencanaan Pendidikan berbasis data valid dan terintegrasi.
2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus.
3. Meningkatnya akses layanan pendidikan menengah, khusus dan inklusif untuk seluruh penduduk usia sekolah.
4. Terwujudnya satuan pendidikan yang memenuhi standar sekolah sehat.
5. Meningkatnya kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi dan karakter siswa
6. Meningkatnya daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga meningkatkan Integritas Peserta Didik
7. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan

Tabel 3
Target Tahunan Capaian Sasaran Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Misi 1	: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”.								
Tujuan	: “Meningkatnya kualitas pendidikan”								
Indikator	: Harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	53,80	54,72	55,65	56,57	57,50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	%	93,22	94,70	96,20	97,70	99,20
		2. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan	Persentase SMA Negeri terakreditasi	%	87,46	89,47	91,48	93,49	95,50
			Persentase SMK Negeri terakreditasi	%	85,02	86,70	88,38	90,07	91,75

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pendidikan khusus	Persentase SLB Negeri terakreditasi	%	53,38	55,03	56,69	58,34	60,00
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	58,2	58,51	58,82	59,13	59,45
			Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	27,4	27,70	28,01	28,32	28,63
			Rasio guru terhadap murid pada SMA	%	14,04	14,54	15,05	15,55	16,06
			Rasio guru terhadap murid pada SMK	%	12,57	12,95	13,32	13,69	14,07
			Rasio guru terhadap murid pada SLB	%	5,27	5,49	5,72	5,95	6,17
		3. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	%	31,5	32	34	35	40
			Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	%	37	37,5	38	39	40
			Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	%	49,33	52,17	53,40	55,22	56
			Jumlah SMK yang terevitalisasi	Unit	3	6	9	12	16
		4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi guru SMA pendidikan minimal S1/D4	%	99,30	99,53	99,77	99,91	100
			Persentase Kualifikasi guru SMK pendidikan	%	99,03	99,28	99,51	99,77	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			minimal S1/D4						
			Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	%	50	55	56	60	65
			Persentase Kualifikasi guru SLB pendidikan minimal S1/D4	%	93,76	95,32	96,88	98,44	100
			Persentase Guru SMA yang bersertifikasi	%	79,73	84,80	89,86	94,93	100
			Persentase Guru SMK yang bersertifikasi	%	79,97	84,99	89,98	95,00	100
			Persentase Guru SLB yang bersertifikasi	%	76,85	82,64	88,42	94,21	100
			Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMA pendidikan minimal S1/D4	%	80,60	85,47	90,26	95,13	100
			Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMK pendidikan minimal S1/D4	%	78,76	84,03	89,46	94,73	100
			Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SLB pendidikan minimal S1/D4	%	88,00	92,00	94,00	98,00	100

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan, maka strategi penyalarsan strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional dengan program pembangunan pendidikan yang telah dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Visi	: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan		
Misi	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1. Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan 2. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen
		2. Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan	1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat 2. Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
		3. Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan	1. Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK 2. Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK 3. Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK 4. Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus 5. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK 6. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB) 7. Pembangunan sekolah baru di zona perbatasan 8. Revitalisasi SMK sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja Penguatan karakter melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

			<ul style="list-style-type: none"> 9. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terutama yang berada pada daerah 3T secara bertahap 10. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus 3. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau di sekolah 2. Mendorong Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota 2. Melaksanakan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota 3. Peningkatan kualitas kompetensi guru

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152-31513 Padang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Barlius, MM
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI
 Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Barat

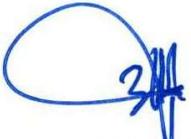
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA


 MAHYELDI

PIHAK PERTAMA


 Drs. BARIUS, MM
 NIP. 19660630 199103 1 006

STEMPEL PARAF DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT				
NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1	Suryanto			
2	Cher	Fu Progen	7-3-23	
3				
4				

PERJANJIAN KINERJA

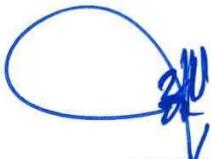
OPD : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,49 %
		2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	54,72 %
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	94,70 %
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase SMA Negeri terakreditasi	89,47 %
		2. Persentase SMK Negeri terakreditasi	86,70 %
		3. Persentase SLB Negeri terakreditasi	55,03 %
3.	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	58,51 %
		2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	27,70 %
4.	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	32 %
		2. Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	37,5 %
		3. Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	52,17 %
		4. Jumlah SMK yang terrevitalisasi	6 unit
5.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	98,04 %
		2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	55 %
		3. Persentase Guru yang bersertifikasi	60 %
		4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	87,17 %
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,3 (A)
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	83 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 1.539.519.792.295	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 714.089.386.164	APBD
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 360.950.960	APBD
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 2.374.379.800	APBD
	JUMLAH	Rp 2.256.344.509.219	APBD

Padang, 09 Januari 2023

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

Drs. BARLIUS, MM
NIP. 19660630 199103 1 006

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Model A (jika capaian > adalah baik) dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Model B (jika capaian < adalah baik) dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Adapun skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja setiap sasaran mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana berikut :

Tabel 5

Skala Penilaian dalam Menilai Tingkat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 6
Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,49	75,85	103,21
		2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	54,72	76,40	139,62
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Se derajat (%)	94,70	104,21	109,99
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase SMA Negeri terakreditasi	89,47	94,92	106,09
		2. Persentase SMK Negeri terakreditasi	86,70	83,48	96,29
		3. Persentase SLB Negeri terakreditasi	55,03	62,07	112,79
3.	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	58,51	71,08	121,48
		2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	27,70	59,77	215,78
4.	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	32	81,48	254,62
		2. Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	37,5	67,43	179,81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		3. Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	52,17	53,64	102,82
		4. Jumlah SMK yang terevitalisasi	6 unit	47 unit	783,33
5.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	98,04	98,07	100,03
		2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	55	41,38	75,24
		3. Persentase Guru yang bersertifikasi	60	63,90	106,50
		4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	87,17	92,48	106,09
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,3 (A)	70,09	87,29
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	83	87,14	104,99

Untuk sasaran strategis nomor 5 yaitu Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Indikator ada perbedaan indikator di Renstra dengan indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas karena di Renstra lebih rinci dan teknis jadi pada PK eselon II dijadikan lebih umum sebagai indikator ketercapaian peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Sumatera Barat.

Indikator pada PK adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4
2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri
3. Persentase Guru yang bersertifikasi
4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4

Indikator di Renstra :

1. Persentase Kualifikasi guru SMA pendidikan minimal
2. Persentase Kualifikasi guru SMK pendidikan minimal S1/D4
3. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di

4. Persentase Kualifikasi guru SLB pendidikan minimal S1/D4
5. Persentase Guru SMA yang bersertifikasi
6. Persentase Guru SMK yang bersertifikasi
7. Persentase Guru SLB yang bersertifikasi
8. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMA pendidikan minimal S1/D4
9. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMK pendidikan minimal S1/D4
10. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SLB pendidikan minimal S1/D4

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban memenuhi target kinerja arah kebijakan dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan peralihan kewenangan yang diamanatkan UU No 23 tahun 2014, pembangunan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat lebih dititik beratkan pada pembangunan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Berikut disajikan tingkat ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan 7 sasaran strategis. Ketujuh arah kebijakan tersebut didukung oleh program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bagian Bidang, UPTD dan Cabang Dinas Wilayah I-VIII di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dijelaskan berdasarkan 7 sasaran strategis karena Indikator kinerja pada Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan ada saling keterkaitan di setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sehingga akan terjadi penjelasan yang berulang dan sama untuk beberapa indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 6 di atas berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisa pencapaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis :

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus**

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus.

Penetapan Target

Pada sasaran Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah terdapat 3 indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dengan target 73,49 % pada tahun 2023
2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dengan target 76,40 % pada tahun 2023
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%) dengan target 90,73% pada tahun 2023

Target ini ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu Pada Jenjang Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Khusus Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN 1 :			
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus			
Indikator Kinerja	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,49	75,85	103,21
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	54,72	76,40	139,62
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	94,70	104,21	109,99

Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus menunjukkan persentase capaian tingkat partisipasi warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada tahun 2021 sebesar 77,19%, pada tahun 2022 sebesar 76,46%. Sedangkan pada tahun 2023 persentase realisasinya yaitu sebesar 75,85%. Berikut ini disajikan cara perhitungan realisasi indikatornya:

$$\frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah}(16 - 18\text{tahun})\text{pendidikan menengah SMA/SMK}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}(16 - 18\text{tahun})} \times 100\% = \frac{225.737}{297.600} \times 100\% = 75,85 \%$$

Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

Indikator kinerja capaian tingkat partisipasi warga negara usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus di Dinas Pendidikan pada tahun 2021 belum melakukan perhitungan realisasi. Pada tahun 2022 persentase realisasinya sebesar 0,38%. Sedangkan pada tahun 2023 sekarang persentase realisasi indikator kinerja ini melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 76,40% yang berarti telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Berikut cara perhitungan realisasi indikatornya:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{jumlah siswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan khusus usia 4 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 4 – 18 tahun}} \times 100\% \\ &= \frac{5.880}{7.696} \times 100\% \\ &= 76,40\% \end{aligned}$$

Indikator berikutnya persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat di tahun 2021 sebesar 103,47% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 103,90%, sedangkan pada tahun 2023 persentase capaian angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat yaitu sebesar 104,21 % yang berarti mengalami kenaikan

Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat tahun 2023 :

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

$$\begin{aligned} \frac{\text{Jumlah seluruh siswa SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}(16 – 18 \text{ tahun})} \times 100\% &= \frac{310.116}{297.600} \times 100\% \\ &= \mathbf{104,21 \%} \end{aligned}$$

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA tahun 2023

$$\begin{aligned} \frac{\text{Jumlah seluruh siswa SMA}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}(16 – 18 \text{ tahun})} \times 100\% &= \frac{153.535}{297.600} \times 100\% \\ &= \mathbf{51,59 \%} \end{aligned}$$

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK tahun 2023

$$\begin{aligned} \frac{\text{Jumlah seluruh siswa SMK}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}(16 – 18 \text{ tahun})} \times 100\% &= \frac{88.282}{297.600} \times 100\% \\ &= \mathbf{29,66 \%} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA dan SMK tahun 2023 diakumulasikan adalah sebesar 81,25%.

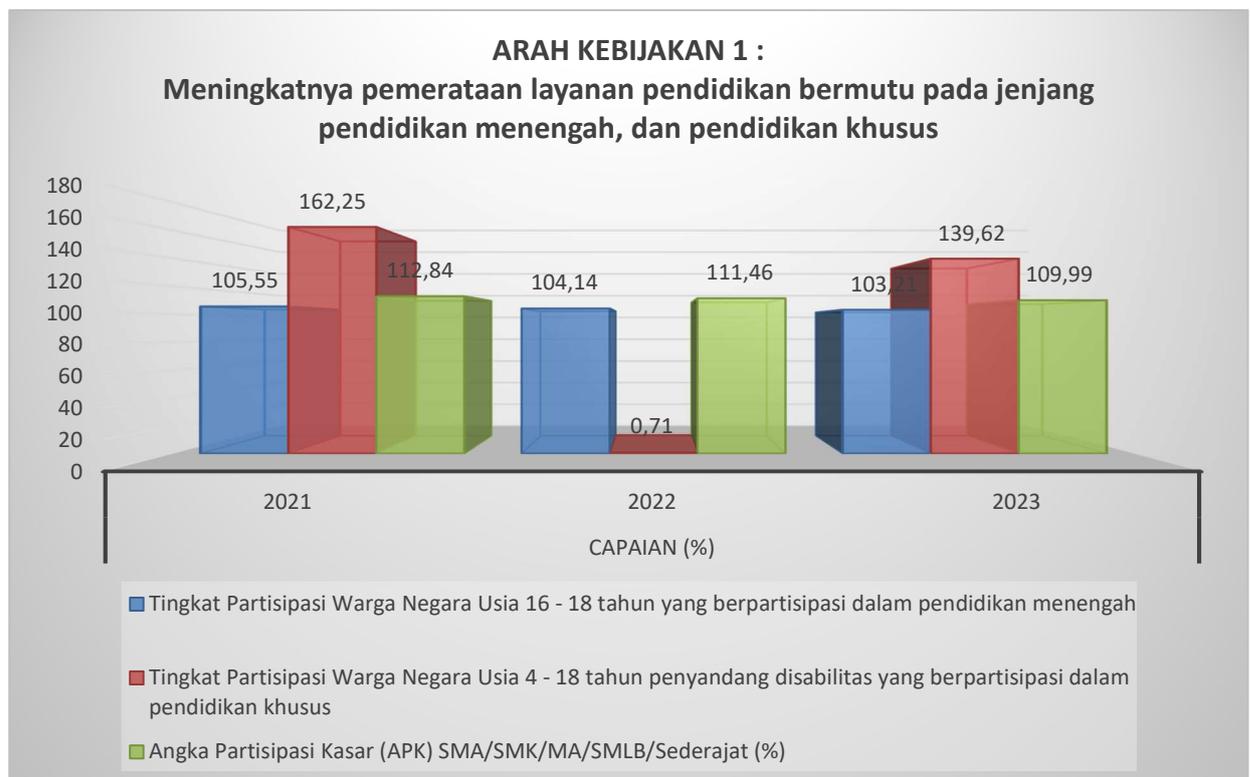
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 8

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu Pada Jenjang Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Khusus Tahun (2021,2022 dan 2023)

SASARAN 1					
Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,55	104,14	73,49	75,85	103,21
2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	162,25	0,71	54,72	76,40	139,62
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	112,84	111,46	94,70	104,21	109,99

Gambar 1
Perbandingan Capaian Sasaran 1



Dari hasil perhitungan didapatlah capaian seperti tergambar pada gambar 1 dimana:

- Pada indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah terdapat penurunan capaian dari 105,55 pada tahun 2021 menjadi 104,14 pada tahun 2022 dan turun lagi pada tahun 2023

sebesar 103,21 yang disebabkan berkurangnya jumlah siswa usia sekolah 16-18 tahun pada tingkat pendidikan menengah.

- Pada indikator tingkat partisipasi Warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini disebabkan karena sumber data untuk indikator ini yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan kebutuhan pendataan terkait indikator ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 angka yang diperoleh masih bersumber website dukcapil secara Nasional yang angka atau perhitungan berbeda dengan kebutuhan pendataan untuk indikator ini
- Pada indikator Angka Partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat, capaiannya juga mengalami penurunan dari 111,46 % pada tahun 2022 menjadi 109,99% pada tahun 2023 yang disebabkan berkurangnya jumlah siswa pada tingkat pendidikan menengah tahun ajaran 2023/2024

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu Pada Jenjang Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Khusus	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,72	75,85	102,89
	2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	57,50	76,40	132,87
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	99,20	104,21	105,05

Untuk realisasi indikator tingkat partisipasi warga negara usia sekolah Provinsi Sumatera Barat berada di atas rata-rata Nasional 68,87 dan berada pada peringkat 3 secara Nasional setelah D.I Yogyakarta dan D.K.I. Jakarta.

Berikut terlihat dari data yang bersumber dari <https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/> sebagai berikut :

**APK/APM SM Sederajat Tiap Provinsi
Tahun 2022/2023**

No	Nama Provinsi	APM
1	D.I. Yogyakarta	84,35
2	D.K.I. Jakarta	79,55
3	Sumatera Barat	76,46
4	Jawa Timur	74,99
5	Bali	73,35
6	Sumatera Utara	71,72
7	Sulawesi Tengah	71,68
8	Kepulauan Riau	71,08
9	Kalimantan Timur	70,94
10	Nusa Tenggara Timur	70,26
11	Bengkulu	69,89
12	Jawa Barat	69,63
13	Nusa Tenggara Barat	69,52
14	Gorontalo	68,90
	INDONESIA	68,87
15	Sulawesi Selatan	67,44
16	Kalimantan Utara	67,38

No	Nama Provinsi	APM
17	Jawa Tengah	67,27
18	Kalimantan Selatan	67,03
19	Banten	66,80
20	Maluku	66,60
21	Riau	66,43
22	Lampung	66,30
23	Jambi	65,01
24	Kalimantan Barat	64,37
25	Maluku Utara	63,11
26	Papua Barat	62,40
27	Sulawesi Barat	60,80
28	Bangka Belitung	60,72
29	Sulawesi Utara	60,28
30	Aceh	60,17
31	Sumatera Selatan	59,83
32	Sulawesi Tenggara	59,62
33	Kalimantan Tengah	58,64
34	Papua	40,59

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan**

Permasalahan muncul pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia sekolah antara lain disebabkan alasan berikut:

- Sumber data yang digunakan adalah APK/SPM hasil perhitungan Kemendikbudristek pada aplikasi Rapor Pendidikan
- Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal, hal ini terlihat pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan menengah di Sumatera Barat
- Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses

pembelajaran di sekolah

- Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

Untuk menjadikan peningkatan kinerja pada indikator ini akan diupayakan beberapa hal berikut sebagai alternatif solusi:

- Mengoptimalkan sumber data dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakomodir semua siswa yang ada di sekolah termasuk siswa yang bersekolah di bawah Kementerian Agama
- Dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan salah satunya memperbanyak USB (Unit Sekolah Baru) di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki sekolah SMA dan SMK, dengan adanya USB, diharapkan semua anak Sumatera Barat bisa sekolah.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- Rencana penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SLB
Disertai juga dengan beberapa aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dan APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C yaitu survey lapangan, perencanaan rehab dan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus**

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus didukung oleh Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pengelolaan Pendidikan.

Penetapan Target

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus terdapat 3 indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

1. Persentase SMA Negeri Terakreditasi dengan target 94,92 % di tahun 2023
2. Persentase SMK Negeri Terakreditasi dengan target 83,48 % di tahun 2023
3. Persentase SLB Negeri Terakreditasi dengan target 62,07 % di tahun 2023

Target ini ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN 2 :			
Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus			
Indikator Kinerja	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)
Persentase SMA Negeri Terakreditasi	89,47	94,92	106,09
Persentase SMK Negeri Terakreditasi	86,70	83,48	96,28
Persentase SLB Negeri Terakreditasi	55,03	62,07	112,79

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 12

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun (2021,2022 dan 2023)

SASARAN 2					
Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus					
Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Persentase SMA Negeri Terakreditasi	114,91	109,01	89,47	94,92	106,09
Persentase SMK Negeri Terakreditasi	114,93	98,18	86,70	83,48	96,28
Persentase SLB Negeri Terakreditasi	172,41	148,58	55,03	62,07	112,79

Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdiri dari beberapa indikator kinerja, yang pertama yaitu persentase realisasi SMA Negeri Terakreditasi pada tahun 2021 yaitu 68,64%, pada tahun 2022 sebesar 95,34% dan pada tahun 2023 persentasenya sebesar 94,92%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator persentase SMA Negeri terakreditasi :

$$\frac{\text{Jumlah SMA negeri terkreditasi minimal B}}{\text{Jumlah seluruh SMA negeri}} \times 100\% = \frac{224}{236} \times 100\% \\ = 94,92\%$$

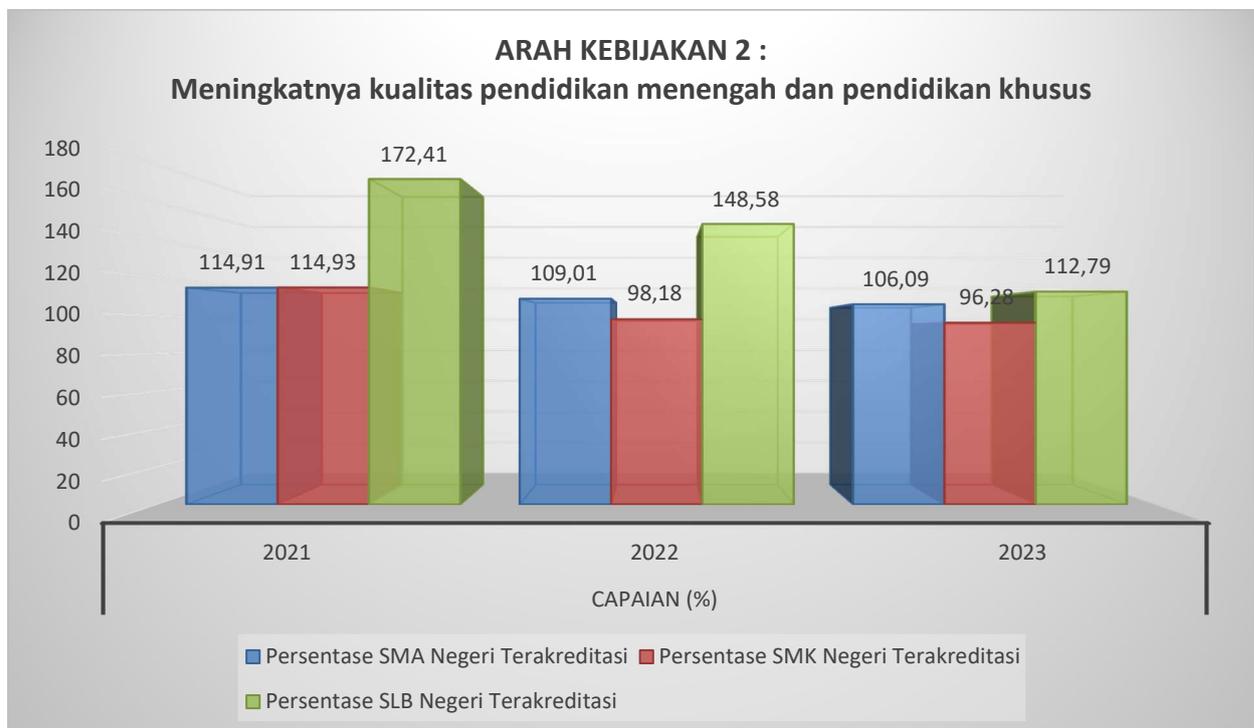
Persentase realisasi SMK Negeri terakreditasi pada tahun 2021 sebesar 83,33%, pada tahun 2022 sebesar 83,47%, dan tahun 2022 persentase realisasi SMK negeri terakreditasi mencapai 83,48%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator persentase SMK Negeri terakreditasi :

$$\frac{\text{Jumlah SMK negeri terkreditasi minimal B}}{\text{Jumlah seluruh SMK negeri}} \times 100\% = \frac{96}{115} \times 100\% \\ = 83,48\%$$

Indikator kinerja berikutnya yaitu persentase SLB Negeri terakreditasi, dimana pada tahun 2021 realisasinya mencapai 40,13%, di tahun 2022 realisasinya mencapai 79,31%. Dan pada tahun 2023 ini, persentasenya sebesar 62,07% dimana masih melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 55,03%. Berikut disajikan perhitungan realisasi indikator persentase SLB Negeri terakreditasi :

$$\frac{\text{Jumlah SLB negeri terkreditasi minimal B}}{\text{Jumlah seluruh SLB negeri}} \times 100\% = \frac{18}{29} \times 100\% \\ = 62,07\%$$

Gambar 2
Perbandingan Capaian Sasaran 2



Dari hasil perhitungan didapatkan capaian seperti tergambar pada gambar 2 dimana:

- Untuk indikator persentase SMA Negeri terakreditasi mengalami penurunan capaian dari 109,01 pada tahun 2022 menjadi 106,09 pada tahun 2023
- Untuk indikator persentase SMK Negeri terakreditasi mengalami penurunan capaian dari 98,18 pada tahun 2022 menjadi 96,28 pada tahun 2023
- Untuk indikator SLB Negeri terakreditasi mengalami penurunan capaian dari 148,58 pada tahun 2022 menjadi 112,79 pada tahun 2023

Hal ini disebabkan karena:

- Untuk akreditasi sekolah ini memiliki jangka waktu, yaitu 5 tahun jadi pada masa perhitungan jika sudah habis jangka waktu akreditasi sekolah akan berstatus tanpa akreditasi dan harus mempersiapkan diri kembali untuk penilaian 5 tahun mendatang
- Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase SMA Negeri Terakreditasi	95,50	94,92	99,39
	Persentase SMK Negeri Terakreditasi	91,75	83,48	90,99
	Persentase SLB Negeri Terakreditasi	60,00	62,07	103,45

Untuk realisasi indikator Sekolah terakreditasi pada sasaran 2 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Hal ini disebabkan karena:

- Untuk akreditasi sekolah ini memiliki jangka waktu, yaitu 5 tahun
- Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah

Untuk meningkatkan persentase capaian indikator sekolah terakreditasi akan diupayakan beberapa hal berikut sebagai alternative solusi:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah
- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Guna mengatasi masalah dalam peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta pemerataan sebaran guru antara perkotaan dan pedesaan

➤ **Sasaran 3 : Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik**

Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik yang berpusat pada perkembangan peserta didik. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik yang berpusat pada persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum dan persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum.

Penetapan Target

Pada sasaran Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik terdapat 2 indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

1. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum 58,51 pada tahun 2023
2. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum 27,70 pada tahun 2023

Target ini ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik dapat digambarkan melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 14
Meningkatnya Kompetensi dan Karakter Peserta Didik Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN 3 :			
Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik			
Indikator Kinerja	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)
Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	58,51	71,08	121,48
Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	27,70	59,77	215,78

2. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 15
Meningkatnya Kompetensi dan Karakter Peserta Didik
Tahun (2021,2022 dan 2023)

SASARAN 3					
Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik					
Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	N/A	74,78	58,51	71,08	121,48
Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	N/A	220,73	27,70	59,77	215,78

3. **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	59,45	71,08	119,56
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	28,63	59,77	208,76

Untuk realisasi indikator Sekolah terakreditasi pada sasaran 3 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Gambar 3
Perbandingan Capaian Sasaran 3



Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat hasil capaian masing-masing indikator pada gambar 3 diatas:

- Persentase capaian siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 74,78% dan pada tahun 2023 menjadi 121,48%. Peningkatan hasil capaian indikator literasi dan numerasi ini merupakan prestasi pada **hasil capaian Rapor Pendidikan** sebagai bukti adanya peningkatan kompetensi dan karakter peserta didik
- Persentase capaian siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum sedikit mengalami penurunan dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2023 seperti yang bisa dilihat pada gambar 3 diatas. Ini juga merupakan **hasil capaian Rapor Pendidikan**. Sebenarnya relasasi tahun 2023 ini naik yaitu 71.08 % dari angka 66,01% di tahun 2022. Tetapi nampak turun dicapaian karena targetnya naik di tahun 2023.

Hambatan dalam peningkatan capaian literasi numerasi ini adalah:

- kemampuan penyelesaian masalah matematika peserta didik
- masih banyak guru yang masih belum mampu menyusun soal numerasi terutama untuk guru-guru di tingkat sekolah dasar agar peserta didik menjadi lebih terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin tersebut. Guru cenderung membuat soal

rutin yang tertutup dan dapat langsung diselesaikan dengan penggunaan suatu rumus.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka tindak lanjut yang telah diupayakan sebagai berikut:

- meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran di sekolah
- pengenalan dan pemahaman platform digital, pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran, pelatihan mengenai etika digital, serta pembinaan keterampilan dan kepekaan informasi digital

➤ **Sasaran 4 : Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus**

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Penetapan Target

Pada sasaran Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus terdapat 4 indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

1. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan Dalam Satu Tahun Setelah Lulus Sekolah dengan target 32% di tahun 2023
2. Persentase Lulusan Pendidikan Menengah yang Melanjutkan pada Pendidikan Tinggi dengan target 37,50 % di tahun 2023
3. Persentase Lulusan Pendidikan SMA yang Diterima pada PTN dengan target 52,17 % di tahun 2023
4. Jumlah SMK yang Terevitalisasi dengan target sejumlah 6 unit di tahun 2023

Target ini ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus dapat digambarkan melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 17

Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN 4 :			
Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus			
Indikator Kinerja	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan Dalam Satu Tahun Setelah Lulus Sekolah	32	81,48	54,62
Persentase Lulusan Pendidikan Menengah yang Melanjutkan pada Pendidikan Tinggi	37,50	67,43	179,81
Persentase Lulusan Pendidikan SMA yang Diterima pada PTN	52,17	53,64	102,82
Jumlah SMK yang Terevitalisasi	6	47	783,33

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 18

Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus Tahun (2021, 2022 dan 2023)

SASARAN 4					
Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus					
Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan Dalam Satu Tahun Setelah Lulus Sekolah	150,00	104,83	32	81,48	54,62
Persentase Lulusan Pendidikan Menengah yang Melanjutkan pada Pendidikan Tinggi	N/A	N/A	37,50	67,43	179,81
Persentase Lulusan Pendidikan SMA yang Diterima pada PTN	46,85	157,92	52,17	53,64	102,82
Jumlah SMK yang Terevitalisasi	100,00	1.066,67	6 Unit	47 Unit	783,33

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 19

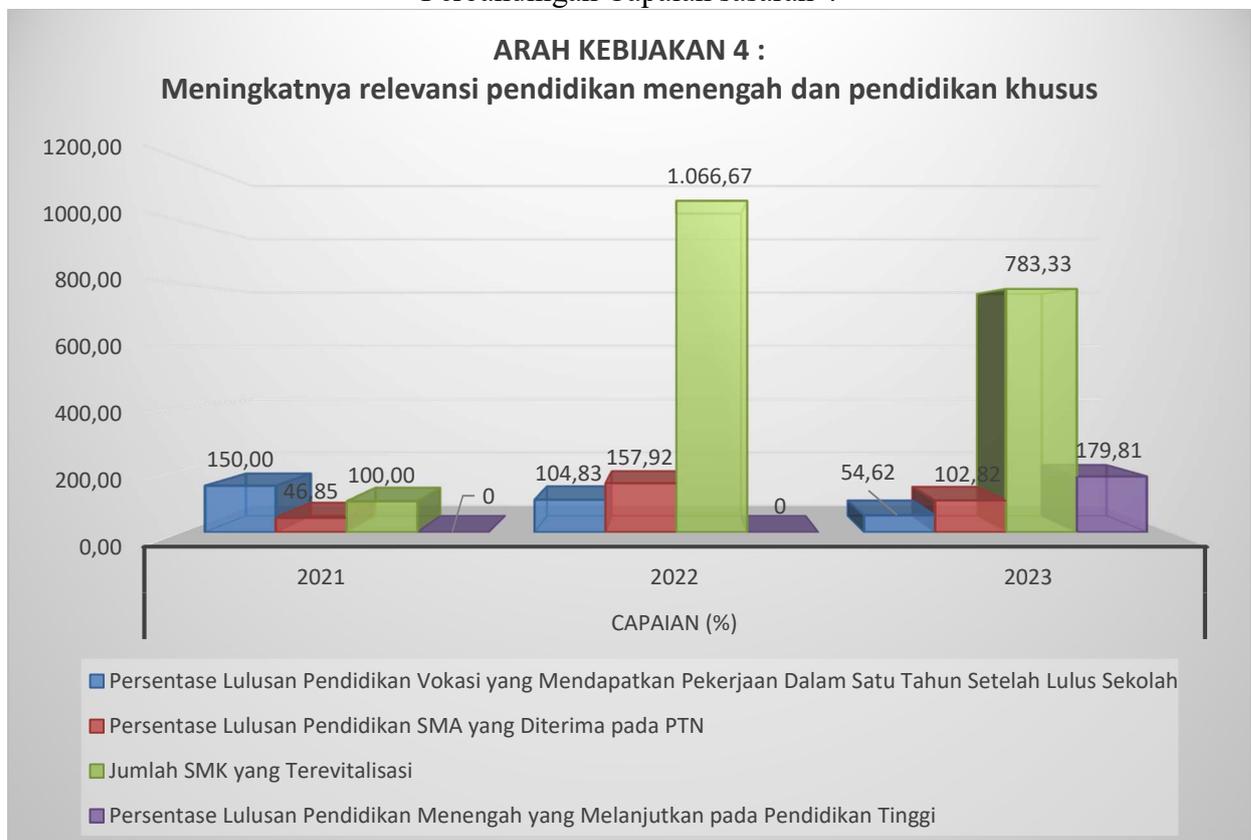
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan Dalam Satu Tahun Setelah Lulus Sekolah	40	81,48	203,70
	Persentase Lulusan Pendidikan Menengah yang Melanjutkan pada Pendidikan Tinggi	40	67,43	168,58
	Persentase Lulusan Pendidikan SMA yang Diterima pada PTN	56	53,64	95,79
	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	16 Unit	47 Unit	293,75

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Gambar 4

Perbandingan Capaian sasaran 4



Perbandingan capaian sasaran 4 ini, setelah dilakukannya perhitungan dapat dilihat sebagai berikut :

- Untuk indikator persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah pada tahun 2022 capaiannya sebesar 104,83% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dimana perhitungannya sebesar 54,62% Penurunan capaian indikator pada sasaran ini disebabkan karena pada tahun ini tidak lagi memakai hitungan secara manual dimana sumber data primer yang dihitung secara manual, namun memakai sebuah **aplikasi** penghitungan lulusan kemendikbudristek yaitu : <https://tracervokasi.kemdikbud.go.id/>
- Untuk indikator persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi, pada tahun 2022 capaiannya belum tersedia dikarenakan belum masuknya di dalam perjanjian kinerja dinas pendidikan. Pada tahun 2023 sekarang capaian indikator ini mencapai 179,81%. Ini merupakan hasil **aplikasi** penghitungan lulusan kemendikbudristek yaitu : <https://tracervokasi.kemdikbud.go.id/>
- Untuk indikator persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada PTN mengalami penurunan, dimana capaian tahun 2022 sebesar 157,92% dan tahun 2023 yaitu 102,82%. Capaian ini merupakan hasil hitungan dari bidang P-SMA yang dihitung secara manual dari target 52,17 % dengan capaian realisasi 53,63 %
- Untuk indikator Jumlah SMK yang Terevitalisasi dilihat dari capaiannya mengalami penurunan, akan tetapi kalau dilihat dari sudut target yang ditetapkan, indikator ini jauh mengalami peningkatan dari 34 jumlah jurusan/bidang yang dijadikan Pusat Keunggulan (PK) pada tahun 2022 dan di tahun 2023 ada 47 jumlah jurusan/bidang yang dijadikan Pusat Keunggulan (PK). Hasil SMK PK ini merupakan hasil seleksi Direktorat SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Penurunan beberapa pencapaian Target pada sasaran 4 ini Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik yaitu :

- Belum ideal jumlah lulusan SMA dengan yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit.
- SMK belum mampu menghasilkan tamatan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan Industri dan dunia kerja.

Tindak Lanjut/Solusinya yang telah dilakukan yaitu:

- Mensosialisasikan perguruan tinggi negeri favorit kepada siswa SMA.
- Meningkatkan kemampuan tamatan SMK sesuai kebutuhan dan tuntutan Industri dan dunia kerja.

Dibawah ini dapat dilihat, daftar nama-nama sekolah SMK yang terevitalisasi pada tahun 2023, sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG	KETERANGAN
1	SMK PP PADANG MENGATAS	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
2	SMKN 1 GUGUK	Teknologi Manufaktur dan Rekavasa	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
3	SMKN 1 BATIPUH	Teknologi Manufaktur dan Rekavasa	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
4	SMKN 5 PADANG	Energi dan Pertambangan	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
5	SMKN 1 SUMATERA BARAT	Teknologi Manufaktur dan Rekavasa	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
6	SMKN 1 PADANG PANJANG	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
7	SMKN 2 PADANG PANJANG	Teknologi Informasi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
8	SMKN 3 PAYAKUMBUH	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
9	SMKN 1 SAWAHLUNTO	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER BARU TAHAP I TAHUN 2023
10	SMKN 1 TANJUNG RAYA	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
11	SMKN 1 TILATANG KAMANG	Energi dan Pertambangan	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
12	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	Teknologi Konstruksi dan Properti	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
13	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
14	SMKN 1 KOTO BARU	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
15	SMKN 1 TALAMAU	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
16	SMKN 1 BUKITTINGGI	Teknologi Konstruksi dan Properti	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023

17	SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
18	SMKN 9 PADANG	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
19	SMK PP NEGERI PADANG	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
20	SMKN 10 PADANG	Kemaritiman	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
21	SMKN 2 SAWAHLUNTO	Energi dan Pertambangan	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
22	SMKN 1 PAYAKUMBUH	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
23	SMKN 4 PAYAKUMBUH	Teknologi Informasi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
24	SMKN 2 PARIAMAN	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP I TAHUN 2023
25	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP II TAHUN 2023
26	SMKS SEMEN PADANG	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP II TAHUN 2023
27	SMKN 2 PAYAKUMBUH	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP II TAHUN 2023
28	SMKN 3 KOTA SOLOK	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP II TAHUN 2023
29	SMKN 6 PADANG	Parwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP II TAHUN 2023
30	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP IV TAHUN 2023
31	SMKN 1 KINALI	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP IV TAHUN 2023
32	SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTT	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP IV TAHUN 2023
33	SMKN 1 SUTERA	Energi dan Pertambangan	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP IV TAHUN 2023
34	SMKN 5 SIJUNJUNG	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP IV TAHUN 2023
35	SMKN 1 PARIAMAN	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP IV TAHUN 2023
36	SMKN 2 LUBUK BASUNG	Energi dan Pertambangan	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP V TAHUN 2023
37	SMKN 1 PASAMAN	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA REGULER LANJUTAN TAHAP V TAHUN 2023
38	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN LANJUTAN TAHUN 2023

39	SMKN 4 PADANG	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN LANJUTAN TAHUN 2023
40	SMKN 8 PADANG	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN LANJUTAN TAHUN 2023
41	SMKN 2 PADANG	Teknologi Informasi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN LANJUTAN TAHUN 2023
42	SMKN 1 PAINAN	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN BARU TAHAP I TAHUN 2023
43	SMKN 2 BATUSANGKAR	Agribisnis dan Agroteknologi	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN BARU TAHAP I TAHUN 2023
44	SMKN 2 BUKITTINGGI	Pariwisata	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN BARU TAHAP I TAHUN 2023
45	SMKN 2 PAINAN	Kemaritiman	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN BARU TAHAP II TAHUN 2023
46	SMKS TEKNOLOGI PLUS PADANG	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN BARU TAHAP II TAHUN 2023
47	SMKN 3 PARIAMAN	Kemaritiman	SMK PUSAT KEUNGGULAN SKEMA PEMADANAN DUKUNGAN BARU TAHAP II TAHUN 2023

➤ **Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pendidikan yang berkualitas tentu dimulai dari tenaga pendidik yang berkualitas pula. Beberapa peningkatan kualitas guru dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun untuk menjadi guru yang berkualitas tentu membutuhkan ketelitian yang tepat dalam memilih calon guru tersebut, atau meningkatkan kualitas guru yang sudah mengabdikan sebagai guru, berikut cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas yang lebih profesional, di antaranya:

- a. Melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi
- b. Mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru
- c. Aktif melakukan penelitian
- d. Menciptakan budaya organisasi pembelajaran
- e. Gerakan Guru Membaca (G2M)

Penetapan Target

Pada sasaran Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terdapat 4 indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

1. Persentase Kualifikasi Guru yang Berpendidikan Minimal S1/D4 dengan target 98,04% di tahun 2023
2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman kerja di Industri dengan target 55 % di tahun 2023
3. Persentase Guru yang Bersertifikasi dengan target 60 % di tahun 2023
4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang Berpendidikan Minimal S1/D4 dengan target 87,17 % di tahun 2023

Target ini ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 20

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN 5 :			
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			
Indikator Kinerja	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)
Persentase Kualifikasi Guru yang Berpendidikan Minimal S1/D4	98,04	98,07	100,03
Persentase Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman kerja di Industri	55	41,38	75,24
Persentase Guru yang Bersertifikasi	60	63,90	106,50
Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang Berpendidikan Minimal S1/D4	87,17	92,48	106,09

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 21

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Tahun (2021, 2022 dan 2023)

SASARAN 5					
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan					
Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Persentase Kualifikasi Guru yang Berpendidikan Minimal S1/D4	100,57	101,63	98,04	98,07	100,03
Persentase Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman kerja di Industri	N/A	N/A	55	41,38	75,24
Persentase Guru yang Bersertifikasi	103,72	68,61	60	63,90	106,50
Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang Berpendidikan Minimal S1/D4	101,76	90,94	87,17	92,48	106,09

Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 dengan persentase realisasi pada tahun 2021 sebesar 97,24% dan persentase realisasi pada tahun 2022 sebesar 98,95%. Sedangkan persentase realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 98,07%.

$$\frac{\text{Jumlah guru yang berpendidikan min S1/D4}}{\text{Jumlah seluruh guru}} \times 100\% = \frac{16.370}{16.692} \times 100\% = 98,07\%$$

Indikator kinerja selanjutnya yaitu Persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri. Pada tahun 2021 dan 2022 indikator kinerja ini belum dilakukannya perhitungan dikarenakan belum adanya di dalam target sasaran yang ditetapkan. Dimulai dari tahun 2023 ini, persentase realisasi guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri yaitu sebesar 41,38%.

$$\frac{\text{Jumlah guru kejuruan SMK mempunyai Pengalaman kerja di industri}}{\text{Jumlah seluruh guru kejuruan SMK}} \times 100\% = \frac{132}{319} \times 100\% = 41,38\%$$

Persentase realisasi guru yang bersertifikasi pada tahun 2021 yaitu 76,30%, pada tahun 2022 persentase realisasinya sebesar 59,11%. Sedangkan pada tahun 2023 persentase realisasi guru yang bersertifikasi sebesar 63,90% melebihi target yang ditetapkan 60%.

$$\frac{\text{Jumlah guru yang Bersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh guru}} \times 100\% = \frac{10.666}{16.692} \times 100\% \\ = 63,90\%$$

Indikator kinerja berikutnya yaitu persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4. Persentase realisasinya pada tahun 2021 sebesar 79,79% dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 74,98%. Sedangkan pada tahun 2023 persentase realisasinya 92,48%.

$$\frac{\text{Jumlah Tendik yang berpendidikan min S 1/D 4}}{\text{Jumlah seluruh Tendik}} \times 100\% = \frac{3.282}{3.549} \times 100\% \\ = 92,48\%$$

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 22

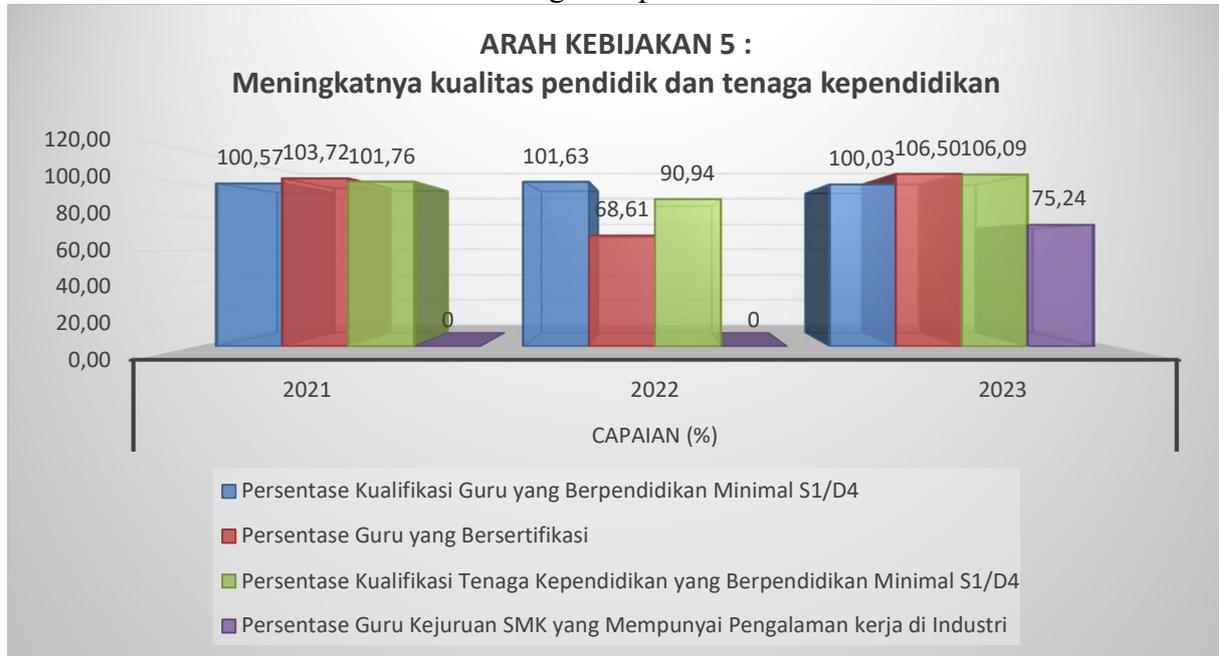
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru yang Berpendidikan Minimal S1/D4	100	98,07	98,07
	Persentase Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman kerja di Industri	65	41,38	63,66
	Persentase Guru yang Bersertifikasi	100	63,90	63,90
	Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang Berpendidikan Minimal S1/D4	100	92,48	92,48

Untuk realisasi indikator Sekolah terakreditasi pada sasaran 5 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Gambar 5
Perbandingan Capaian Sasaran 5



Untuk sasaran Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perbandingan capaiannya dapat dilihat pada gambar 5 diatas, dimana penjelasannya sebagai berikut :

- Untuk indikator persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 pada tahun 2023 ini sudah melebihi target di dalam perjanjian kinerja dinas pendidikan, dimana capaiannya pada tahun ini yaitu sebesar 100,03%
- Untuk indikator persentase guru yang bersertifikasi jauh mengalami peningkatan pada tahun 2023 ini dibandingkan tahun 2022. Dimana capaiannya tahun 2022 sebesar 68,61% dan pada tahun 2023 menjadi 106,50%
- Untuk indikator persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 pada tahun 2023 sekarang juga mengalami peningkatan capaian. Yaitu pada tahun 2022 capaiannya sebesar 90,94% dan tahun 2023 meningkat menjadi 106,09%
- Untuk indikator persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri pada tahun 2023 ini baru dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja dinas pendidikan, capaian indikator ini masih belum melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,24%

Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target pada sasaran 5 Meningkatnya Kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu :

- Masih adanya guru dan tenaga kependidikan yang berpendidikan di bawah S1/D4.
- Masih adanya guru yang belum bersertifikasi.

Untuk itu diperlukan solusi berikut yang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hambatan yang ada:

- Untuk guru dan tenaga kependidikan yang masih berijazah di bawah S1/D4 diharuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang minimal setingkat S1/D4.
- Meningkatkan kualitas guru untuk dapat memiliki sertifikasi.

Berikut data lengkap jumlah pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2023

Keterangan	SMA	SMK	SLB	Jumlah
	(org)	(org)	(org)	(org)
Jumlah guru/pendidik	10.086	6.085	521	16.692
Guru/pendidik minimal D4/S1	9.928	5.949	493	16.370
Guru sertifikasi	6.308	4.041	317	10.666
Jumlah tendik	2.219	1254	76	3.549
Tendik minimal D4/S1	825	444	23	3282

Sumber : <https://dss.datadik.kemdikbud.go.id/>

➤ Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran Rp 1.581.330.501.738,- dan realisasi Rp 1.465.537.835.697,- (92,68%) .

Penetapan Target

Pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target 80,3 di tahun 2023. Target ini ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN 6 :			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi			
Indikator Kinerja	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,3	70,09	87,29

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 23

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Tahun (2021,2022 dan 2023)

ARAH KEBIJAKAN 6					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi					
Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	100	87,98	80,3	70,09	87,29
	(B)	(B)	(A)	(B)	

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 24

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	100 (A)	70,09	70,09

Untuk realisasi indikator Sekolah terakreditasi pada sasaran 6 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Gambar 6
Perbandingan Capaian Sasaran 6



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi menunjukkan persentase capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang sedikit mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 capaiannya sebesar 87,98% sedangkan pada tahun 2023 sekarang capaiannya sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 87,29%. Dimana hal ini merupakan hasil penilaian tim evaluasi SAKIP provinsi Sumbar yaitu Inspektorat yang telah melakukan penilaian yang dituangkan dalam Rekomendasi LHE tahun 2023 sebagai berikut:

- Dokumen Perencanaan telah tersedia, namun ada ketidakselarasan antara Renstra, Cascading, IKU dan PK
- Belum Semua target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun 2022 telah dicapai
- Belum Semua pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (PK Individu)
- Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- Capaian target dalam rencana Aksi secara periodik (triwulan) belum sepenuhnya dipantau kemajuannya
- Belum semua pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- Dinas Pendidikan telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja namun SOP tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai

dengan mekanismenya

- Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien.
- Pengukuran Capaian Kinerja yang seharusnya dilakukan secara Periodik (Realisasi Rencana Aksi) belum dilaksanakan sampai dengan Staf
- Setiap level organisasi belum seluruhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
- Pengumpulan Data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)
- Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta mempengaruhi penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja hanya sebatas mempengaruhi realisasi fisik dan keuangan
- Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran Kinerja
- Dokumen laporan kinerja telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja
- Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, namun belum sepenuhnya menginformasikan keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan
- Dokumen laporan kinerja juga belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional.
- Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun bidang/unit belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan capaian kinerja internal dan pemantauan capaian kinerja internal yang dilaksanakan belum sampai dengan staf
- Pemantauan capaian kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
- Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti
- Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sepenuhnya dimanfaatkan

untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas PD

- Perbaikan dan peningkatan kinerja belums sepenuhnya dimanfaatkan asil evaluasi

Atas penurunan dan permasalahan di atas upaya yang telah dilakukan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan antara lain:

- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya
- Menetapkan tujuan yang jelas dan merinci indikator kinerja yang terukur dan dapat dipantau
- Menyusun dokumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023
- Mempedomani dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam menyusun dokumen tahunan Dinas Pendidikan
- Menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.
- Melakukan evaluasi internal secara berkala untuk melihat pencapaian kinerja, anggaran yang telah ditetapkan.
- Pemberian sertifikat penghargaan terhadap Pegawai dengan Kinerja Baik

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

- Belum semua ASN di Dinas Pendidikan memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.
- Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam memonev kinerja bawahan secara bertingkat.
- Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan LKjIP.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

- Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP yang disusun
- Meningkatkan pemahaman ASN secara intensif terkait SAKIP
- Secara konsisten melakukan evaluasi internal agar dapat membantu mengidentifikasi pencapaian dan kendala dalam implementasi SAKIP
- Membangun sistem penghargaan untuk mendorong dan menghargai pencapaian kinerja yang baik dan menerapkan sanksi yang proporsional bagi yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

➤ **Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**

Penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diperoleh dengan melakukan survey melalui kuisioner Pelayanan Publik pada link <https://forms.gle/KUtJK8evRVSaUNxU8> yang dimulai pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024.

Dari survey yang dilakukan melalui kuisioner diatas dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

Keterangan	Nilai		
TOTAL RESPONDEN	224	RESUME	
NILAI MAKS	10.752		
SKOR RESPONDEN	9.369		
INTERVAL	25		
		Keterangan	
		75%-100%	SANGAT BAIK/SESUAI/MUDAH
		50%-74,99%	BAIK
		25%-49,99%	KURANG
		0%-24,99%	TIDAK BAIK
NILAI DISDIK	87,14%	KATEGORI : SANGAT BAIK/SESUAI/MUDAH	

Penetapan Target

Pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, indikator kinerja untuk mengukur sasaran 7 ini, yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target 83% di tahun 2023.

Target ini ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 25
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN 7 :			
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi			
Indikator Kinerja	2023		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83	87,14	104,99

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 26
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Tahun (2021,2022 dan 2023)

SASARAN 7					
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi					
Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	N/A	109,16	83	87,14	104,99

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi menunjukkan persentase realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2022 sebesar 84,05%. Dan pada tahun ini, persentase realisasinya meningkat menjadi 87,14%. Dengan begitu, pelayanan organisasi Dinas Pendidikan sudah cukup baik dibuktikan melalui kuisioner yang telah dilakukan.

$$\frac{\text{Jumlah skor responden}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100\% = \frac{9.369}{10.752} \times 100\% = 87,14\%$$

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

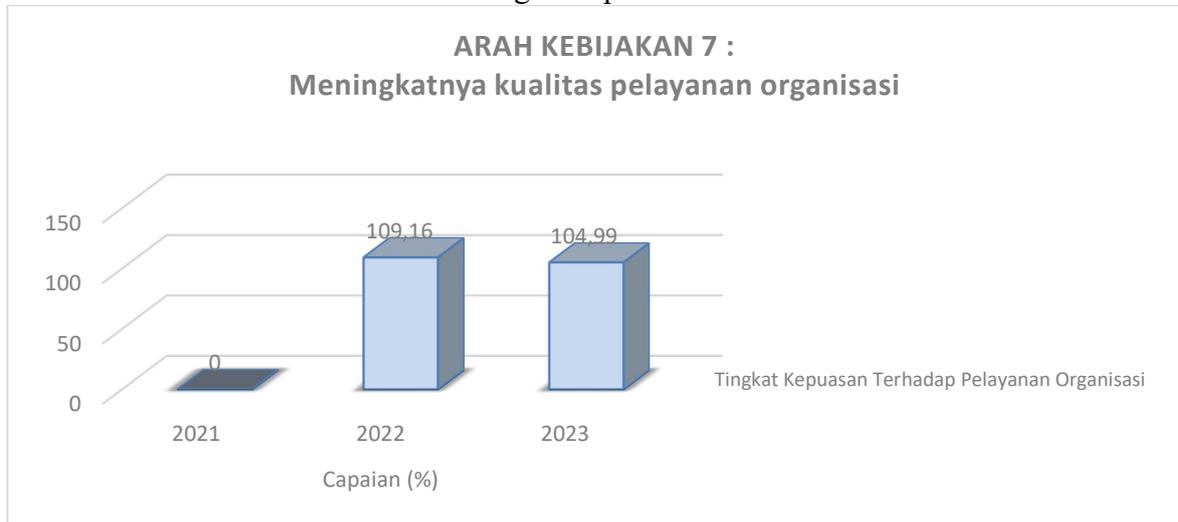
Tabel 27
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100	87,14	87,14

Untuk realisasi indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Gambar 7
Perbandingan Capaian Sasaran 7



Untuk indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2023 ini sudah melebihi target yang ditetapkan didalam perjanjian kinerja dinas pendidikan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun lalu capaiannya sedikit mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 capaiannya sebesar 109,16% dan pada tahun 2023 ini capaiannya sebesar 104,99%.

Dalam hal meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, Dinas Pendidikan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana layanan
- Melaksanakan pelayanan sesuai SOP
- Meningkatkan kualitas SDM pemberi layanan melalui sosialisasi/Bimtek
- Monitoring dan evaluasi pelayanan pada Dinas Pendidikan.

Disamping upaya yang telah dilakukan, Dinas Pendidikan mengupayakan hal-hal sebagai berikut dalam menghadapi beberapa hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan:

- Sarana dan prasarana yang tersedia masih banyak yang tidak layak digunakan, mencakup peralatan dan fasilitas yang memerlukan perbaikan atau penggantian.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan:

- Jumlah dan kualifikasi SDM yang memberikan layanan masih terbatas, menyebabkan keterbatasan dalam cakupan dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Pendidikan memiliki beberapa langkah perbaikan ke depan, yaitu:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan:

- Mengadakan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap untuk memperluas ruang rapat dan memperbaiki fasilitas yang tidak layak.
- Melakukan pemeliharaan secara berkala agar sarana dan prasarana selalu berfungsi optimal.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

- Melakukan upaya konsisten dalam meningkatkan kualifikasi dan keterampilan SDM yang memberikan layanan, seperti pelatihan dan pengembangan.

3. Respons Cepat terhadap Perubahan Peraturan:

- Mengupayakan sistem yang responsif terhadap perubahan peraturan dan ketentuan di tingkat daerah yang berdampak pada jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.

D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program dengan 64 Kegiatan dan 220 sub kegiatan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 2.294.596.753.568,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2.294.596.753.568	2.159.838.343.763
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	711.625.367.464	691.960.138.359
2	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	13.516.389.056	12.652.640.120
3	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	18.041.664.080	17.177.915.144
4	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	15.125.005.418	14.543.691.068
5	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1.463.019.797.150	1.353.073.116.352
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	86.784.919.456	83.083.482.840
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **2.294.596.753.568,-** terealisasi sebesar Rp. **2.159.838.343.763,-** atau 94,13%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 5,87%. Berikut rincian sub kegiatan yang mendukung sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus. Berikut ini program/kegiatan yang menunjang sasaran 1 :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	DINAS PENDIDIKAN		348.093.021.916	340.776.934.634	97,90	99,00		
				1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2	unit	8.000.000.000	6.195.755.118	77,45	99,00
				2	Penambahan Ruang Kelas Baru	14	unit	4.870.000.000	4.196.048.879	86,16	99,00
				3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3	ruang	1.039.647.000	1.036.203.000	99,67	99,00
				4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2	ruang	645.803.000	630.035.377	97,56	99,00
				5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	3	ruang	1.374.508.000	1.330.336.000	96,79	99,00
				6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	5	ruang	1.884.451.000	1.820.652.160	96,61	99,00
				7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2	ruang	576.007.000	575.979.000	100,00	99,00
				8	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2	ruang	615.000.000	529.953.461	86,17	99,00
				9	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5	ruang	1.482.335.000	1.470.375.000	99,19	99,00
				10	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	ruang	800.000.000	644.829.286	80,60	99,00
				11	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	7	ruang	2.640.836.424	2.263.183.361	85,70	99,00
				12	Pembangunan Asrama Sekolah	8	ruang	4.829.739.488	4.326.221.857	89,57	99,00
				13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	128	sekolah	26.800.879.000	25.733.712.568	96,02	99,00
				14	Pembangunan Fasilitas Parkir	3	sekolah	530.000.000	521.561.046	98,41	99,00
				15	Pembangunan Kantin Sekolah	4	ruang	800.000.000	795.326.991	99,42	99,00
				16	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	3	ruang	1.022.586.000	1.021.521.000	99,90	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)	
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17 ruang	12.920.831.000	12.892.517.120	99,78	99,00
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25 ruang	4.213.638.000	4.213.559.751	100,00	99,00
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	4 ruang	886.179.000	886.179.000	100,00	99,00
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	5 ruang	1.117.714.000	1.117.714.000	100,00	99,00
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	6 ruang	1.341.256.000	1.341.256.000	100,00	99,00
		22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	5 ruang	942.640.000	942.640.000	100,00	99,00
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	2 ruang	265.766.000	265.766.000	100,00	99,00
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 ruang	452.300.000	452.300.000	100,00	99,00
		25	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	9 ruang	1.463.708.000	1.461.106.883	99,82	99,00
		26	Rehabilitasi Asrama Sekolah	1 ruang	93.000.000	86.029.084	92,50	99,00
		27	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23 ruang	8.493.938.240	7.335.490.144	86,36	99,00
		28	Pengadaan Mebel Sekolah	3 sekolah	1.270.000.000	1.193.355.190	93,96	99,00
		29	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.093 paket	6.080.000.000	5.715.600.000	94,01	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)	
		30	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5 sekolah	4.010.442.342	3.472.313.945	86,58	99,00
		31	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1.522 orang	5.000.000.000	4.957.862.600	99,16	99,00
		32	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	338 dokumen	3.065.751.000	2.788.387.791	90,95	99,00
		33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236 satuan pendidikan	238.399.240.422	238.399.240.422	100,00	99,00
		34	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236 sekolah	164.826.000	163.922.600	99,45	99,00
		CABDIN 1			6.974.207.107	6.494.489.457	93,12	99,00
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 paket	364.739.350	361.810.000	99,20	99,00
		2	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 paket	497.317.680	491.270.000	98,78	99,00
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	30 sekolah	6.112.150.077	5.641.409.457	92,30	99,00
		CABDIN 2			2.923.081.919	2.904.116.541	99,35	99,00
		1	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 paket	228.489.814	228.412.780	99,97	99,00
		2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 bulan	2.694.592.105	2.675.703.761	99,30	99,00
		CABDIN 5			2.788.108.820	2.095.976.806	75,18	99,00
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	12 bulan	2.788.108.820	2.095.976.806	75,18	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Ujian bagi Peserta Didik					
		CABDIN 6		5.352.029.212	5.234.008.298	97,79	99,00
		1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	287.834.357	287.053.284	99,73	99,00
		2 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 unit	146.059.480	145.465.860	99,59	99,00
		3 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 bulan	4.918.135.375	4.801.489.154	97,63	99,00
		TOTAL		366.130.448.974	357.505.525.736	97,64	99,00
	2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	DINAS PENDIDIKAN		282.921.692.099	273.738.722.572	96,75	99,00
		1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2 unit	8.000.000.000	5.184.737.630	64,81	99,00
		2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4 ruang	3.001.710.000	3.000.955.000	99,97	99,00
		3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang	660.771.848	486.115.300	73,57	99,00
		4 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	18 ruang	28.200.340.000	28.016.369.400	99,35	99,00
		5 Pembangunan Ruang Laboratorium	14 ruang	10.218.240.000	10.217.240.000	99,99	99,00
		6 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 ruang	1.559.027.000	1.534.900.200	98,45	99,00
		7 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 ruang	400.229.000	399.637.000	99,85	99,00
		8 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 ruang	1.037.366.700	828.710.800	79,89	99,00
		9 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	46 sekolah	14.745.558.000	13.888.606.739	94,19	99,00
		10 Pembangunan Kantin Sekolah	1 ruang	200.000.000	179.453.950	89,73	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)	
		11	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1 ruang	5.185.526.000	5.165.676.500	99,62	99,00
		12	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang	345.335.000	329.321.030	95,36	99,00
		13	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	1 ruang	1.446.928.000	1.446.928.000	100,00	99,00
		14	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1 ruang	260.447.000	260.447.000	100,00	99,00
		15	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 sekolah	667.523.000	604.035.910	90,49	99,00
		16	Pengadaan Mebel Sekolah	3 sekolah	1.425.000.000	1.398.323.000	98,13	99,00
		17	Pengadaan Peralengkapan Peserta Didik	111 jenis/unit	4.735.530.300	4.494.875.600	94,92	99,00
		18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9 jenis/unit	46.543.370.473	42.767.617.292	91,89	99,00
		19	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	1 dokumen	6.551.881.662	5.800.434.555	88,53	99,00
		20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	111 satuan pendidikan	147.671.960.416	147.671.960.416	100,00	99,00
		21	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	111 sekolah	64.947.700	62.377.250	96,04	99,00
		CABDIN 1			2.092.626.600	2.038.274.664	97,40	99,00
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	190.864.000	189.660.000	99,37	99,00
		2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	14 sekolah	1.901.762.600	1.848.614.664	97,21	99,00
		CABDIN 2			1.542.464.646	1.328.479.191	86,13	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)		
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	paket	36.540.000	36.539.999	100,00	99,00
		2	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	paket	234.717.000	216.525.142	92,25	99,00
		1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	bulan	1.271.207.646	1.075.414.050	84,60	99,00
		CABDIN 5		2.115.878.018	1.775.800.302	83,93	99,00		
		1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	bulan	2.115.878.018	1.775.800.302	83,93	99,00
		CABDIN 6		2.735.815.936	2.525.581.622	92,32	99,00		
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	unit	48.360.000	48.360.000	100,00	99,00
		2	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	unit	408.407.000	405.205.622	99,22	99,00
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	bulan	2.279.048.936	2.072.016.000	90,92	99,00
		JUMLAH		291.408.477.299	281.406.858.351	96,57	99,00		
	3	DINAS PENDIDIKAN		53.610.143.341	52.588.519.672	98,09	99,00		
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		unit	4.000.000.000	3.253.996.132	81,35	99,00
		2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		unit	216.840.000	216.840.000	100,00	99,00
		3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		unit	1.130.000.000	1.084.308.000	95,96	99,00
		4	Pembangunan Kantin Sekolah		unit	1.368.094.100	1.368.094.100	100,00	99,00
		5	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		unit	366.480.000	366.480.000	100,00	99,00
		6	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		unit	2.620.664.000	2.618.103.800	99,90	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)	
		7	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang	257.012.000	257.012.000	100,00	99,00
		8	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	unit	128.456.000	128.456.000	100,00	99,00
		9	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	bilik	661.268.000	661.268.000	100,00	99,00
		10	Pengadaan Peralengkapan Peserta Didik	jenis/unit	700.000.000	669.574.950	95,65	99,00
		11	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	jenis/unit	924.863.851	748.510.400	80,93	99,00
		12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	dokumen	939.999.300	919.432.250	97,81	99,00
		13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29 satuan pendidikan	40.236.266.090	40.236.266.090	100,00	99,00
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29 sekolah	60.200.000	60.177.950	99,96	99,00
		CABDIN 1			204.161.000	194.739.400	95,39	99,00
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 paket	88.584.600	88.163.000	99,52	99,00
		2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	4 sekolah	115.576.400	106.576.400	92,21	99,00
		CABDIN 2			98.081.500	98.065.200	99,98	99,00
		1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 bulan	98.081.500	98.065.200	99,98	99,00
		CABDIN 5			78.295.350	71.317.000	91,09	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		1 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 bulan	78.295.350	71.317.000	91,09	99,00
CABDIN 6				95.760.000	95.113.000	99,32	99,00
		1 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 bulan	95.760.000	95.113.000	99,32	99,00
JUMLAH				54.086.441.191	53.047.754.272	98,08	99,00
TOTAL				711.625.367.464	691.960.138.359	97,24	99,00

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik

Berikut ini program/kegiatan yang menunjang sasaran 2 dan 3 :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	135.739 peserta didik	9.545.620.300	9.106.874.950	95,40	99,00
	2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100 peserta didik	3.075.867.100	2.691.581.887	87,51	99,00
	3 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	494 peserta didik	533.950.696	499.329.083	93,52	99,00
2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1 buku	360.950.960	354.854.200	98,31	99,00
JUMLAH				13.516.389.056	12.652.640.120	93,61	99,00

4. Sasaran 4 : Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Berikut ini program/kegiatan yang menunjang sasaran 4 :

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Volume		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	SMKN 2 BUKITTINGGI				305.000.000	305.000.000	100,00	99,00
				1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit kerja	305.000.000	305.000.000	100,00	99,00
				SMKN 2 PADANG				675.762.024	675.762.024	100,00	99,00
				1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit kerja	675.762.024	675.762.024	100,00	99,00
				SMKN 3 PARIAMAN				974.763.000	974.763.000	100,00	99,00
				1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit kerja	974.763.000	974.763.000	100,00	99,00
				SMKN 6 PADANG				561.000.000	561.000.000	100,00	99,00
				1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit kerja	561.000.000	561.000.000	100,00	99,00
				SMKN 9 PADANG				2.008.750.000	2.008.750.000	100,00	99,00
				1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	unit kerja	2.008.750.000	2.008.750.000	100,00	99,00
				JUMLAH				4.525.275.024	4.525.275.024	100,00	99,00
				TOTAL				18.041.664.080	17.177.915.144	95,21	99,00

5. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Berikut ini program/kegiatan yang menunjang sasaran 5 :

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Volume		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	15,9	orang	852.310.100	771.321.750	90,50	99,00
				2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	373	orang	2.122.069.700	1.911.303.700	90,07	99,00

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Volume		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	bulan	5.157.580.662	5.066.600.662	98,24	99,00
		2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	bulan	6.487.965.956	6.296.785.956	97,05	99,00
				2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	111	sekolah	74.879.000	67.479.000	90,12	99,00
		3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	bulan	430.200.000	430.200.000	100,00	99,00
		JUMLAH								15.125.005.418	14.543.691.068

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Berikut ini program/kegiatan yang menunjang sasaran 6 :

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Volume		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	704.682.600	639.587.600	90,76	99,00		
				2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3	dokumen	260.017.500	260.017.200	100,00	99,00		
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	163.226.200	157.341.200	96,39	99,00		
				4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen	257.132.400	236.792.400	92,09	99,00		
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	1.458.999.065.974	1.349.327.003.210	92,48	99,00		
				2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	bulan	1.974.284.426	1.873.116.681	94,88	99,00		
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	dokumen	661.388.050	579.258.061	87,58	99,00		
		JUMLAH								1.463.019.797.150	1.353.073.116.352	92,48	99,00

7. Sasaran 7 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut ini program/kegiatan yang menunjang sasaran 7 :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DINAS PENDIDIKAN			13.532.829.103	12.527.823.569	92,57	99,00	
	1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	doku- men	1.044.880.000	988.235.004	94,58	99,00
		2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	doku- men	192.685.500	147.302.500	76,45	99,00
		3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	doku- men	105.000.000	96.680.000	92,08	99,00
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	kali	75.944.700	73.119.000	96,28	99,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	41.010.400	40.645.000	99,11	99,00
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95	unit	1.481.325.933	1.460.705.320	98,61	99,00
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	401	unit	785.506.350	734.688.000	93,53	99,00
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	3.560.207.500	3.231.458.000	90,77	99,00
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	163.082.500	163.053.250	99,98	99,00
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	1.021.899.100	943.759.413	92,35	99,00
	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	unit	2.242.807.000	2.077.694.371	92,64	99,00
	5	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	50.221.000	50.210.000	99,98	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	831.624.500	766.023.309	92,11	99,00
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.237.386.620	1.075.040.147	86,88	99,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	339.500.000	325.495.000	95,87	99,00
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	161.004.000	157.378.810	97,75	99,00
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	198.744.000	196.336.445	98,79	99,00
UPTD BALTEKKOMDIK				851.537.392	839.910.148	98,63	99,00
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	75.814.500	71.882.700	94,81	99,00
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	28.105.364	28.105.250	100,00	99,00
		3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	303.020.864	302.938.512	99,97	99,00
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	297.830.000	295.936.500	99,36	99,00
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	146.766.664	141.047.186	96,10	99,00
CABDIN 1				10.816.748.821	10.416.445.065	96,30	99,00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	5.164.290.000	5.142.650.000	99,58	99,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3.914.500	3.914.500	100,00	99,00
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	2.389.150.200	2.316.409.100	96,96	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Pnggunaan	12 bulan	14.750.000	14.750.000	100,00	99,00
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1.256.816.159	954.014.626	75,91	99,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	3.150.000	3.150.000	100,00	99,00
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.634.400	18.474.550	89,53	99,00
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.935.733.562	1.935.733.562	100,00	99,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	16.950.000	15.988.727	94,33	99,00
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	11.360.000	11.360.000	100,00	99,00
CABDIN 2				6.103.872.260	6.023.265.950	98,68	99,00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	5.221.990.000	5.193.280.000	99,45	99,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.248.100	2.247.900	99,99	99,00
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	168.370.200	167.835.000	99,68	99,00
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Pnggunaan	12 bulan	14.179.250	14.179.250	100,00	99,00
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	493.985.716	455.149.040	92,14	99,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.050.000	1.050.000	100,00	99,00
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	25.361.500	17.854.380	70,40	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)			
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	unit	35.000.000	35.000.000	100,00	99,00	
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	116.987.494	113.540.222	97,05	99,00	
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	16.950.000	15.433.908	91,06	99,00
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	bulan	7.750.000	7.696.250	99,31	99,00	
CABDIN 3						6.720.563.565	6.555.582.936	97,55	99,00	
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	3.349.770.000	3.321.520.000	99,16	99,00
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	3.079.600	3.009.000	97,71	99,00
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	1.556.927.817	1.513.901.500	97,24	99,00	
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	21.887.875	16.092.250	73,52	99,00	
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	dokumen	240.984.375	168.510.800	69,93	99,00	
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	3.150.000	3.150.000	100,00	99,00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	19.200.000	15.056.800	78,42	99,00	
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	unit	35.000.000	35.000.000	100,00	99,00	
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	1.460.793.898	1.459.029.242	99,88	99,00	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)			
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	16.950.000	15.738.344	92,85	99,00
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	bulan	12.820.000	4.575.000	35,69	99,00
	CABDIN 4				7.925.028.652	7.876.421.822	99,39	99,00		
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	2.278.080.000	2.267.790.000	99,55	99,00
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	3.112.500	3.112.500	100,00	99,00
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	3.888.109.600	3.868.762.800	99,50	99,00
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	9.875.000	7.651.000	77,48	99,00
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	dokumen	207.461.750	207.402.728	99,97	99,00
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	3.000.000	3.000.000	100,00	99,00
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	29.175.000	24.214.820	83,00	99,00
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	1.484.274.802	1.475.135.070	99,38	99,00
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	16.950.000	14.362.904	84,74	99,00
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	bulan	4.990.000	4.990.000	100,00	99,00
	CABDIN 5				7.466.241.125	6.630.896.512	88,81	99,00		
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	4.633.480.000	4.207.670.000	90,81	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)			
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	3.232.500	3.130.450	96,84	99,00
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	1.176.107.500	1.174.357.900	99,85	99,00
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	8.694.250	8.665.750	99,67	99,00
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	dokumen	1.243.571.015	855.762.385	68,81	99,00
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	2.000.000	2.000.000	100,00	99,00
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	28.630.000	21.247.350	74,21	99,00
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	unit	35.000.000	35.000.000	100,00	99,00
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	312.855.860	302.198.184	96,59	99,00
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	16.950.000	15.998.493	94,39	99,00
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	bulan	5.720.000	4.866.000	85,07	99,00
	CABDIN 6						9.612.777.590	8.619.769.308	89,67	99,00
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	5.592.320.000	5.158.080.000	92,24	99,00
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	3.112.500	3.092.500	99,36	99,00
2			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	2.168.976.252	1.780.339.900	82,08	99,00	
3			Penyediaan Barang Cetak	12	bulan	7.247.000	7.247.000	100,00	99,00	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		4 dan Penggandaan					
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1.117.549.900	964.039.012	86,26	99,00
	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.020.000	2.020.000	100,00	99,00
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	15.600.000	9.830.262	63,01	99,00
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	35.000.000	32.000.000	91,43	99,00
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	646.901.938	642.899.384	99,38	99,00
	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	16.950.000	16.046.250	94,67	99,00
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	7.100.000	4.175.000	58,80	99,00
CABDIN 7				12.206.642.050	12.189.940.886	99,86	99,00
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	10.369.000.000	10.369.000.000	100,00	99,00
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3.162.500	3.162.500	100,00	99,00
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	1.185.643.500	1.173.278.500	98,96	99,00
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	19.329.000	19.329.000	100,00	99,00
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	265.190.000	265.140.000	99,98	99,00
	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.030.000	1.030.000	100,00	99,00
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.000.000	16.607.936	83,04	99,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 orang	319.237.050	319.236.950	100,00	99,00
	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	16.950.000	16.056.000	94,73	99,00
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	7.100.000	7.100.000	100,00	99,00
CABDIN 8				11.548.678.898	11.403.426.644	98,74	99,00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	10.770.440.000	10.677.420.000	99,14	99,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3.281.500	3.281.500	100,00	99,00
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	238.718.420	219.317.930	91,87	99,00
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	21.227.132	19.052.153	89,75	99,00
		4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	287.792.750	262.287.600	91,14	99,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4.000.000	4.000.000	100,00	99,00
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	38.049.200	35.037.565	92,08	99,00
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	39.000.000	39.000.000	100,00	99,00
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 orang	134.599.896	134.599.896	100,00	99,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	11.570.000	9.430.000	81,50	99,00
JUMLAH				86.784.919.456	83.083.482.840	95,73	99,00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja. Untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja sesuai dengan amanat yang telah menjadi janji Dinas Pendidikan Provinsi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta 18 (delapan belas) target kinerja yang mendukung berjalannya sasaran strategis tersebut.

Sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 relatif baik dan berhasil. Tingkat keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai pengukuran kinerja, dari sebanyak 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, rata-rata capaian kinerjanya tinggi di tahun 2023. Namun demikian tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara bertahap berdasarkan waktu yang telah ditentukan, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara efektif sehingga dapat di realisasikan dengan baik.
2. Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan dengan lebih intensif lagi.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Esselon II
2. Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2023
3. Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja

APK/APM SM Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2023/2024

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 16-18 Tahun	SISWA							Jumlah	SISWA USIA 16 - 18 th							Jumlah	APK	APM
			SMA	SMLB	SMK	Paket C	MA	Salaf Ulya	Bimas Non Islam		SMA	SMLB	SMK	Paket C	MA	Salaf Ulya	Bimas Non Islam			
1	D.K.I. Jakarta	433.410	193.162	1.290	196.845	18.022	30.549	1.822	168	441.858	153.795	744	165.304	6.120	25.127	1.086	118	352.294	101,95	81,28
2	Jawa Barat	2.459.720	823.771	6.129	1.068.475	258.064	260.289	13.982	79	2.430.789	640.593	3.047	845.970	78.127	203.242	7.482	41	1.778.502	98,82	72,31
3	Banten	595.520	225.308	1.307	251.415	40.604	67.365	3.115	59	589.173	165.142	710	188.094	12.015	52.496	1.414	44	419.915	98,93	70,51
4	Jawa Tengah	1.648.010	452.954	4.261	804.419	88.434	213.843	17.906	35	1.581.852	342.248	2.184	600.968	29.420	167.699	9.588	25	1.152.132	95,99	69,91
5	D.I. Yogyakarta	164.450	61.131	1.305	88.842	5.585	20.399	1.425	5	178.692	49.758	581	72.774	1.761	16.457	823	2	142.156	108,66	86,44
6	Jawa Timur	1.779.310	548.681	4.549	774.568	108.903	370.753	27.171	357	1.834.982	443.326	2.063	633.832	21.051	277.583	11.074	252	1.389.181	103,13	78,07
7	Aceh	305.400	137.657	1.021	54.100	34.394	49.298	14.931	-	291.201	98.297	486	38.594	8.966	39.395	6.690	-	192.428	95,35	63,01
8	Sumatera Utara	798.338	389.899	754	304.565	32.536	116.336	11.877	1.476	857.443	269.692	292	216.254	8.259	91.508	7.353	1.002	594.360	107,40	74,45
9	Sumatera Barat	297.600	153.535	1.316	88.282	24.072	40.131	2.780	-	310.116	120.144	497	68.680	5.129	29.423	1.864	-	225.737	104,21	75,85
10	Riau	377.350	172.295	717	105.325	15.067	48.572	5.428	121	347.525	129.559	341	81.117	4.118	38.369	3.644	80	257.228	92,10	68,17
11	Kepulauan Riau	113.000	57.275	294	37.984	4.736	5.990	1.285	-	107.564	44.723	171	30.503	1.471	4.531	892	-	82.291	95,19	72,82
12	Jambi	182.620	81.429	434	49.229	13.741	33.426	6.090	-	184.349	57.641	232	35.768	2.770	25.767	3.762	-	125.940	100,95	68,96
13	Sumatera Selatan	448.649	220.114	579	125.925	22.379	52.456	3.236	-	424.689	145.954	307	85.890	4.366	39.304	1.932	-	277.753	94,66	61,91
14	Bangka Belitung	76.110	31.454	231	24.636	4.777	7.024	250	75	68.447	23.214	139	18.432	1.072	5.309	167	59	48.392	89,93	63,58
15	Bengkulu	100.900	54.694	269	28.542	11.882	11.128	533	-	107.048	39.627	113	21.088	2.224	8.396	378	-	71.826	106,09	71,19
16	Lampung	422.529	172.818	423	150.736	28.321	53.460	2.189	33	407.980	126.831	226	112.625	6.979	41.093	1.041	24	288.819	96,56	68,35
17	Kalimantan Barat	260.759	132.567	321	75.741	14.831	25.179	566	669	249.874	93.240	167	54.485	2.806	18.544	352	471	170.065	95,83	65,22
18	Kalimantan Tengah	141.143	62.671	303	33.166	12.162	16.112	1.195	192	125.801	45.551	172	24.806	2.744	12.175	802	132	86.382	89,13	61,20
19	Kalimantan Selatan	207.900	68.164	497	55.438	28.762	35.467	17.838	17	206.183	51.839	297	42.799	7.224	27.757	10.267	13	140.196	99,17	67,43
20	Kalimantan Timur	191.440	82.333	545	83.110	13.546	12.605	1.328	217	193.684	61.806	342	62.983	3.471	10.024	972	161	139.759	101,17	73,00
21	Kalimantan Utara	36.470	18.886	91	10.457	4.095	2.623	-	152	36.304	14.758	44	8.345	5.25	2.020	-	107	25.699	99,54	70,47
22	Sulawesi Utara	122.340	63.567	418	45.766	14.372	6.690	80	448	131.341	40.093	144	31.106	1.905	5.130	60	298	78.736	107,36	64,36
23	Gorontalo	60.190	31.646	189	16.807	6.263	6.562	7	-	61.474	23.517	81	12.781	1.141	4.972	2	-	42.494	102,13	70,60
24	Sulawesi Tengah	154.647	79.866	318	41.943	19.205	21.438	1.603	189	164.562	59.932	139	31.494	3.457	15.925	938	145	112.030	106,41	72,44
25	Sulawesi Selatan	459.330	230.017	906	120.300	46.843	71.250	3.442	162	472.920	165.510	407	86.684	7.669	55.212	2.359	112	317.953	102,96	69,22
26	Sulawesi Barat	83.480	29.665	315	25.073	14.628	11.559	1.508	113	82.861	22.796	66	18.914	2.631	8.657	1.053	85	54.202	99,26	64,93
27	Sulawesi Tenggara	176.200	94.537	497	34.736	28.051	17.385	735	-	175.941	65.734	243	24.066	4.211	12.983	435	-	107.672	99,85	61,11
28	Maluku	104.600	69.590	197	21.812	9.131	9.344	90	506	110.670	47.385	92	15.350	1.229	6.874	41	366	71.337	105,80	68,20
29	Maluku Utara	84.587	44.809	257	19.151	11.457	11.107	63	465	87.309	30.914	140	13.156	2.548	8.080	46	322	55.206	103,22	65,27
30	Bali	199.160	95.685	549	89.129	4.793	4.889	24	387	195.456	74.974	346	69.753	1.197	3.980	10	331	150.591	98,14	75,61
31	Nusa Tenggara Barat	287.030	116.920	740	77.712	27.215	75.990	2.515	-	301.092	84.382	260	57.032	4.402	58.047	1.875	-	205.998	104,90	71,77
32	Nusa Tenggara Timur	338.560	207.039	524	103.874	15.336	11.484	-	9.009	347.266	147.888	255	74.028	1.780	8.571	-	6.233	238.755	102,57	70,52
33	Papua	78.090	33.269	88	13.363	4.088	1.014	-	642	52.464	23.812	41	5.685	456	852	-	281	35.127	67,18	44,98
34	Papua Barat	27.620	16.881	18	6.736	2.464	1.166	-	203	27.468	11.471	11	4.634	338	806	-	90	17.350	99,45	62,82
35	Papua Selatan	27.690	12.884	32	7.007	3.100	353	-	745	24.121	8.348	18	4.682	269	258	-	395	13.970	87,11	50,45
36	Papua Tengah	84.470	16.214	104	11.181	7.431	132	-	633	35.695	10.552	60	7.290	1.470	110	-	192	19.674	42,26	23,29
37	Papua Pegunungan	46.950	13.843	-	4.425	5.521	-	-	511	24.300	9.101	-	3.040	1.536	-	-	257	13.934	51,76	29,68
38	Papua Barat Daya	29.250	14.260	41	8.985	1.839	1.671	-	111	26.907	9.569	26	6.097	195	1.255	-	50	17.192	91,99	58,78
	Indonesia	13.404.822	5.311.490	31.829	5.059.800	1.006.450	1.725.039	145.014	17.779	13.297.401	3.953.716	15.484	3.879.003	247.052	1.327.931	78.402	11.688	9.513.276	99,20	70,97

REKAPITULASI PENDUDUK USIA SEKOLAH (USIA 4 S.D 18 TAHUN) MENURUT JENIS DISABILITAS DAN JENIS KELAMIN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Usia 4 s.d 18 Tahun																	
		DISABILITAS FISIK			DISABILITAS NETRA/BUTA			DISABILITAS RUNGU/WACARA			DISABILITAS MEHALUJWA			DISABILITAS FISIK DAN MENTAL			DISABILITAS LAINNYA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	59	57	116	49	64	113	54	41	95	311	190	501	35	33	68	25	23	48
1302	Kabupaten Solok	7	9	16	17	11	28	23	18	41	140	71	211	4	2	6	2	-	2
1303	Kabupaten Sijunjung	12	7	19	16	6	22	30	24	54	300	162	465	2	4	6	5	16	12
1304	Kabupaten Tanah Datar	58	32	90	3	8	11	51	37	88	286	145	432	6	9	15	7	6	13
1305	Kabupaten Padang Paraman	10	6	16	8	8	16	37	17	54	181	97	278	5	-	5	7	3	10
1306	Kabupaten Agam	17	11	28	17	7	24	28	30	58	262	115	410	-	-	-	2	1	3
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	11	14	25	12	11	23	34	31	65	246	109	354	-	1	1	2	1	6
1308	Kabupaten Pasaman	12	7	19	8	7	13	14	17	31	166	77	243	-	1	1	2	1	3
1309	Kabupaten Kep. Mentawai	4	1	5	5	4	9	5	6	11	14	5	19	1	-	1	13	15	28
1310	Kabupaten Dharmasraya	27	18	43	4	2	6	19	25	45	69	40	109	16	4	20	13	16	29
1311	Kabupaten Solok Selatan	5	3	8	3	2	5	18	14	32	111	61	172	2	-	2	26	34	60
1312	Kabupaten Pasaman Barat	15	12	27	13	7	20	19	13	32	54	41	95	3	1	4	12	14	24
1371	Kota Padang	19	16	35	21	11	32	95	59	154	794	375	1.169	2	1	3	12	9	21
1372	Kota Solok	1	6	7	4	1	5	6	5	11	101	44	145	-	-	-	1	-	1
1373	Kota Sawahlunto	2	4	6	-	1	1	14	16	30	52	25	78	1	1	2	15	3	22
1374	Kota Padang Panjang	4	3	7	2	1	3	15	8	23	124	58	182	1	2	3	1	-	1
1375	Kota Bukittinggi	4	2	6	-	1	1	9	12	21	170	97	267	1	-	1	4	4	8
1376	Kota Payakumbuh	7	5	12	3	2	5	13	12	25	183	106	289	-	-	-	2	-	2
1377	Kota Pariaman	4	3	7	2	3	5	5	11	16	63	31	94	4	3	7	7	4	11
	Sumatera Barat	278	214	492	185	157	342	480	397	886	3.650	1.854	5.513	83	62	145	172	146	318

Sumber : Data Koncoides Barah (DKB) Semester I 2023

Padang, Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat

Drs. Basri Rahmad, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 195609191986021006

Akreditasi SMA

Count of Akreditasi		Column Labels			
Row Labels		A	B	C	Grand Total
▣ SMA		161	63	12	236
Kab. Agam		17	4		21
Kab. Dharmasraya		7	7	2	16
Kab. Kepulauan Mentawai		3	7	1	11
Kab. Lima Puluh Koto		10	5	1	16
Kab. Padang Pariaman		13	6	1	20
Kab. Pasaman		8	3	1	12
Kab. Pasaman Barat		8	5		13
Kab. Pesisir Selatan		17	8		25
Kab. Sijunjung		9	3	1	13
Kab. Solok		9	8	2	19
Kab. Solok Selatan		6	2	3	11
Kab. Tanah Datar		14	1		15
Kota Bukittinggi		5			5
Kota Padang		16	1		17
Kota Padang Panjang		4			4
Kota Pariaman		5	1		6
Kota Payakumbuh		4	1		5
Kota Sawah Lunto		2	1		3
Kota Solok		4			4
Grand Total		161	63	12	236

Akreditasi SMK

Count of Akreditasi		Column Labels				
Row Labels		A	B	C	Grand Total	
▣ SMK		1	22	74	18	115
Kab. Agam			2	8		10
Kab. Dharmasraya				6	2	8
Kab. Kepulauan Mentawai					3	3
Kab. Lima Puluh Koto		1	1	4	1	7
Kab. Padang Pariaman			1	3	1	5
Kab. Pasaman			1	2	3	6
Kab. Pasaman Barat				7	2	9
Kab. Pesisir Selatan				6	3	9
Kab. Sijunjung			3	3	2	8
Kab. Solok				8	1	9
Kab. Solok Selatan				5		5
Kab. Tanah Datar			1	4		5
Kota Bukittinggi			1	1		2
Kota Padang			7	7		14
Kota Padang Panjang			2			2
Kota Pariaman			2	2		4
Kota Payakumbuh			1	3		4
Kota Sawah Lunto				2		2
Kota Solok				3		3
Grand Total		1	22	74	18	115

Akreditasi SLB

Count of Akreditasi	Column Labels	A	B	C	Grand Total
Kab. Agam			2		2
SLBN 1 AMPEK ANGKEK			1		1
SLBN 1 LUBUK BASUNG			1		1
Kab. Dharmasraya			1		1
SLBN 1 PULAU PUNJUNG			1		1
Kab. Lima Puluh Koto			1		1
SLBN 1 HARAU			1		1
Kab. Pasaman		1	1		2
SLBN 1 LUBUK SIKAPING		1			1
SLBN 1 PANTI			1		1
Kab. Pasaman Barat			1		1
SLBN 1 SUNGAI AUR			1		1
Kab. Pesisir Selatan			1	3	4
SLBN 1 LENGAYANG				1	1
SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI			1		1
SLBN 1 PAINAN				1	1
SLBN 1 RANAH PESISIR				1	1
Kab. Sijunjung			2		2
SLBN 1 KAMANG BARU			1		1
SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG			1		1
Kab. Solok		1	1		2
SLBN 1 ALAHAN PANJANG		1			1
SLBN 1 KUBUNG			1		1
Kab. Solok Selatan		1		1	2
SLBN 1 SANGIR				1	1
SLBN 1 SUNGAI PAGU		1			1
Kab. Tanah Datar		1	1		2
SLBN 1 LIMA KAUM		1			1
SLBN 1 PAGARUYUNG			1		1
Kota Bukittinggi			1		1
SLBN 1 BUKITTINGGI			1		1
Kota Padang		2			2
SLBN 1 PADANG		1			1
SLBN 2 PADANG		1			1
Kota Padang Panjang				1	1
SLBN 1 PADANG PANJANG				1	1
Kota Pariaman			1	1	2
SLBN 1 PARIAMAN				1	1
SLBN 2 PARIAMAN			1		1
Kota Payakumbuh			1		1
SLBN 1 PAYAKUMBUH			1		1
Kota Sawah Lunto			2		2
SLBN 1 SAWAHLUNTO			1		1
SLBN 2 SAWAHLUNTO			1		1
Kota Solok				1	1
SLBN 1 SOLOK				1	1
Grand Total		4	216	7	29

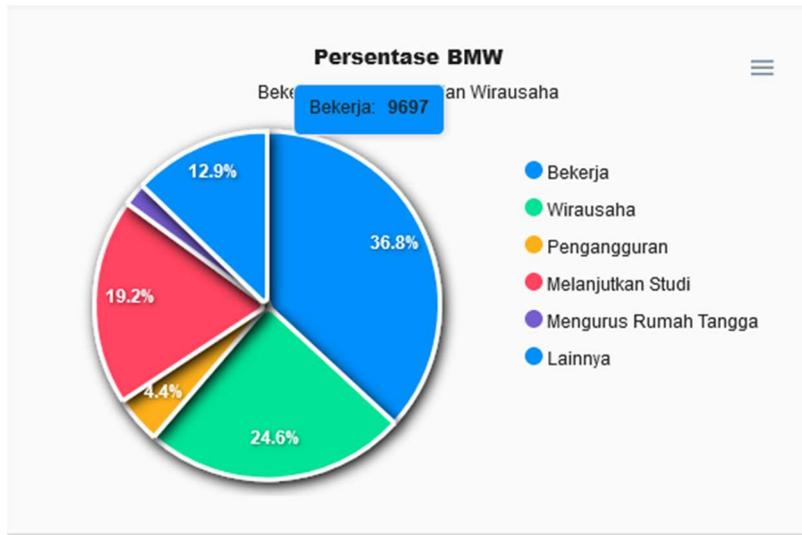
Indikator	Jenjang	Capaian 2023	Target 2023	Target 2024	Adjusted Target 2024	Target 2025
1. A.1 Kemampuan Literasi	SMA	71.08	69.99	71.95	Tetap	74.72
2. A.1 Kemampuan Literasi	SMK	65.47	65.74	66.96	Tetap	69.21
3. A.1 Kemampuan Literasi	SDLB	63.78	65.60	66.10	65,62	66.14
4. A.1 Kemampuan Literasi	SMP LB	60.34	72.75	73.25	72,76	73.27
5. A.1 Kemampuan Literasi	SMALB	65.47	66.32	67.32	Tetap	68.32
6. A.2 Kemampuan Numerasi	SMA	59.77	57.51	59.72	61,20	62.63
7. A.2 Kemampuan Numerasi	SMK	55.63	53.52	55.58	56,79	57.95
8. A.2 Kemampuan Numerasi	SDLB	54.88	66.82	66.82	Tetap	67.54
9. A.2 Kemampuan Numerasi	SMP LB	61.07	64.89	64.89	Tetap	65.39
10. A.2 Kemampuan Numerasi	SMALB	54.02	53.94	56.02	55,76	57.58
11. A.4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	SMK	81.48	87.52	90.12	Tetap	91.18
12. A.6 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	SMK	84.29	78.79	85.00	Tetap	86.34
13. B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	Umum	84.33	100.00	100.00	Tetap	100.00
14. B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	Umum	44.61	100.00	100.00	Tetap	100.00
15. D.10 Iklim Inklusivitas	SMA	59.46	60.48	63.48	Tetap	66.65
16. D.10 Iklim Inklusivitas	SMK	55.99	58.13	60.29	Tetap	62.72
17. D.10 Iklim Inklusivitas	SDLB	56.66	61.18	64.44	Tetap	65.44
18. D.10 Iklim Inklusivitas	SMP LB	65.67	68.19	71.49	Tetap	72.49
19. D.10 Iklim Inklusivitas	SMALB	64.39	68.57	71.93	Tetap	72.93
20. D.4 Iklim Keamanan	SMA	73.15	79.14	81.14	Tetap	83.14
21. D.4 Iklim Keamanan	SMK	69.17	76.93	78.93	Tetap	79.43
22. D.4 Iklim Keamanan	SDLB	73.85	83.27	83.27	Tetap	83.77
23. D.4 Iklim Keamanan	SMP LB	72.53	80.93	80.93	Tetap	81.43
24. D.4 Iklim Keamanan	SMALB	72.39	87.13	88.13	Tetap	89.13
25. D.8 Iklim Kebinekaan	SMA	73.55	70.75	73.12	75,59	77.63
26. D.8 Iklim Kebinekaan	SMK	70.28	68.92	71.32	Tetap	75.52
27. D.8 Iklim Kebinekaan	SDLB	64.81	72.04	74.20	72,54	75.20
28. D.8 Iklim Kebinekaan	SMP LB	65.89	68.55	70.78	Tetap	71.78
29. D.8 Iklim Kebinekaan	SMALB	66.03	68.46	70.64	Tetap	71.64

TINGKAT PENDIDIKAN GURU (INDUK-NEGERI)																
Count of Pendidikan																
Row Labels	D1	D2	D3	D4	Informal	Lainnya	null	Profesi	S1	S2	S3	SD / sede	SMA / s	SMP Sp-1	Tidak sekolah	Grand Total
SLB		2	19	2					1	484	9		4			521
SMA		1	1	39	10	1	25	2	20	8837	1078	3	14	39	13	10086
SMK				34	64	3	21		28	5285	599	1	11	32	7	6085
Grand Total		3	20	75	74	4	46	2	49	14.606	1.686	4	25	75	20	16.692

JUMLAH GURU PENGALAMAN				
Count of Tempat Tugas				
Row Labels	Induk	Induk	Grand Total	
SMK		319	4	323
Grand Total		319	4	323

Count of Bidang Studi Sertifikasi		
Row Labels	Induk	Grand Total
SLB	317	317
SMA	6.308	6.308
SMK	4.041	4.041
Grand Total	10.666	10.666

TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN																				
Count of Pendidikan																				
Row Labels	D1	D2	D3	D4	Informal	Lainnya	null	Paket A	Paket B	Paket C	Profesi	Putus SD	S1	S2	SD / sederajat	SMA / sederajat	SMP / sederajat	Tidak sekolah	Grand Total	
SLB		1	9	1		1				4		1	22		1		29	5	2	76
SMA		29	19	325	6	1	1	1	2	9	27	1	3	804	15	58	832	76	10	2219
SMK		10	12	174	5	1		1	3	15	2		432	7	45		501	44	2	1254
Grand Total		39	32	508	12	1	3	1	3	12	3	4	1.258	22	104	1.362	125	14	3.549	



Responden

23959

Total Responden

Alumni

23706

Total Lulusan

Satuan Pendidikan

204

Total Satpen

Dunia Usaha/Industri

49

Total DUDI

Progress PROVINSI

Pengisian pengisian sistem tracer pada tingkat PROVINSI

	SELESAI MENGISI	TARGET POPULASI	PERSENTASE
Alumni	23706	28367	83.57 %
Satpen	204	206	99.03 %

TOTAL RESPONDEN	224		
NILAI MAKS	10752		
INTERVAL	25		
SANGAT BAIK/SESUAI/MUDAH	75%-100%		
BAIK	50%-74,99%		
KURANG	25%-49,99%		
TIDAK BAIK	0%-24,99%		
NILAI DISDIK	87,14%	KATEGORI : SANGAT BAIK/SESUAI/MUDAH	